

BAB 4

KONSEP PENGEMBANGAN

4.1 Rencana Struktur Ruang

4.1.1 Rencana Sistem Perkotaan

Menurut undang-undang nomer 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, sistem perkotaan adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Sistem perkotaan kawasan strategis Pantai timur Jambi merupakan sistem perkotaan yang mendukung terwujudnya kawasan ekonomi bernilai tinggi yang berkelanjutan, yang mampu memberikan dukungan bagi peningkatan ekonomi wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Tujuan ini dicapai dengan menghubungkan antar kawasan di dalam wilayah pantai timur Jambi, menghubungkan Pantai Timur Jambi dengan pusat-pusat ekonomi di Jambi dan sekitarnya, menghubungkan Pantai Timur Jambi dengan luar wilayah, peningkatan dan pengembangan sistem pemukiman, sumber energi, telekomunikasi dan sumber daya air. Penentuan dalam penetapan kawasan strategis provinsi Jambi memperhatikan MP3EI, RTRW Provinsi Jambi, RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013-2033

Rencana sistem perkotaan pada kawasan strategis dengan tipologi koridor ekonomi memiliki muatan:

- (1) Sistem Pusat Pelayanan; dan
- (2) Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Untuk Mendukung Fungsi Kawasan, meliputi:
 - a) Sistem jaringan prasarana utama yang mendukung aksesibilitas kawasan koridor ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi lain terkait yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada RTRW; dan
 - b) Sistem jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada RTRW.

Sistem perkotaan yang dibentuk memiliki suatu hierarki pusat-pusat kegiatan sesuai dengan kemampuan pelayanan suatu wilayah perkotaan dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang. Penentuan pusat kegiatan ekonomi didasarkan pada hubungan dan kemampuan pelayanan dari masing-masing pelabuhan di kawasan pantai timur Jambi yakni terdiri dari pelabuhan Ujung Jabung, Muara Sabak dan Kuala Tungkal serta pelabuhan pengumpan Mendahara dan Nipah Panjang juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kondisi geografis dan jaringan sarana prasarana pendukungnya.

Berdasarkan hasil analisis, pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung diprediksi akan memicu peningkatan jumlah penduduk sekitar 130.000 jiwa pada akhir tahun rencana. Analisis tersebut berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Model pengembangan kawasan industri di Ujung Jabung adalah berupa *industrial park*. Menurut DeChiara & Koppleman dalam Urban Planning & Design Criteria, *industrial park* memiliki kepadatan penduduk (tenaga kerja) 34 orang/ha *gross floor area*;
2. KDB yang direncanakan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung sebesar maksimal 30% dari luas total kawasan (4200 Ha);
3. Tenaga kerja tersebut diasumsikan terdiri atas 2 (dua) kategori, yakni lajang dan berkeluarga, dengan perbandingan jumlah 1:2 secara berturut-turut. Kategori tenaga kerja berkeluarga diasumsikan membawa 3 (tiga) orang anggota keluarga, yakni isteri dan 2 (dua) orang anak; dan
4. Permukiman perkotaan yang direncanakan adalah perkotaan dengan kepadatan berkisar sekitar 150 jiwa/ha.

Peningkatan jumlah penduduk di Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung tersebut berarti akan membutuhkan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat pelayanan. Oleh karena itu, direncanakan pendistribusian penduduk dari Ujung Jabung tersebut ke beberapa pusat permukiman perkotaan di wilayah KSP Pantai Timur Provinsi Jambi. Berikut tabel rencana pendistribusian penduduk ke beberapa pusat permukiman perkotaan di wilayah KSP Pantai Timur Provinsi Jambi.

Tabel 4.2 Rencana Distribusi Penduduk pada Beberapa Sistem Permukiman Perkotaan

No	Kecamatan	Bagian Wilayah Perkotaan	Proyeksi Penduduk 2031 (jiwa)	Rencana Distribusi Penduduk dari Ujung Jabung (jiwa)	Total Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Rencana Permukiman (Ha)			Kepadatan (jiwa/ha)
						Luas berdasarkan RDTR	Luas Tambahan Rencana	Total Luas Rencana KSP	
1	Sadu	Kawasan Ujung Jabung*	130000	20000	26199	10	0	10	137.01
		Sungai Itik	3421			51.22	130.00	181.22	
		Sungai Lokan	2778						
2	Nipah Panjang	Nipah Panjang I	11044	50000	78888	256.54	250.00	506.54	155.74
		Nipah Panjang II	15543						
		Bunga Tanjung	2301						
3	Rantau Rasau	Bandar Jaya	3760	30000	33760	75.53	130.00	205.53	164.26
4	Berbak	Simpang Desa	13669	30000	43669	70.31	250.00	320.31	136.33
	Total		182516	130000	182516	463.6	760.00	1223.6	149.16

Keterangan:

* Proyeksi bangkitan jumlah penduduk akibat pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung

Sumber: Analisis Rencana, 2014 k perkotaan Sadu maupun Kawasan Ujung Jabung itu sendiri direncanakan akan mewadahi sekitar 20.000 penduduk. Jumlah penduduk yang akan diwadahi

pada wilayah ini dibatasi karena fungsi utama di Kawasan Ujung Jabung adalah sebagai kawasan industri dan pelabuhan yang tidak diarahkan pada fungsi permukiman perkotaan yang meluas. Luas permukiman perkotaan yang akan memuat penduduk di Kecamatan Sadu sekitar 191,22 ha dengan rincian 10 ha berada di Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung dan 181,22 ha berada di perkotaan Sadu.

Kecamatan Nipah Panjang direncanakan akan memuat sekitar 50.000 penduduk (tenaga kerja) hasil bangkitan dari kegiatan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung. Distribusi penduduk di perkotaan Nipah Panjang direncanakan dialokasikan dalam jumlah lebih besar karena lokasinya yang dekat dengan Kawasan Ujung Jabung dan dilengkapi dengan sarana prasarana transportasi yang cukup lengkap. Perkotaan Nipah Panjang dan Kawasan Ujung Jabung dihubungkan dengan jalur rel kereta api dan masing-masing dilengkapi dengan stasiun KA. Selain itu, kedua wilayah tersebut juga dihubungkan dengan jalan kolektor (dijelaskan lebih lanjut pada sub bab rencana sistem jaringan transportasi). Kelengkapan sarana prasarana transportasi tersebut memudahkan mobilisasi penduduk (tenaga kerja) yang bekerja di Kawasan Ujung Jabung dan tinggal di Perkotaan Nipah Panjang. Selain itu, dalam rencana sistem perkotaan, Perkotaan Nipah Panjang ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan) sehingga memiliki kemampuan untuk memuat penduduk dalam jumlah yang lebih besar dan memberikan pelayanan sosial ekonomi yang lengkap.

Kecamatan Rantau Rasau, terutama di bagian wilayah perkotaannya, yakni Desa Bandar Jaya, direncanakan akan memuat sekitar 30.000 penduduk (tenaga kerja) hasil bangkitan dari kegiatan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung. Perkotaan Rantau Rasau ini direncanakan sebagai PKLp dalam rencana sistem perkotaan sehingga memiliki kemampuan untuk memuat tambahan penduduk (tenaga kerja) dan memberikan pelayanan sosial ekonomi yang lengkap.

Bagian wilayah perkotaan Kecamatan Berbak, tepatnya di Simpang Desa direncanakan akan memuat sekitar 30.000 penduduk (tenaga kerja) hasil bangkitan dari kegiatan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung. Simpang Desa ini terletak di lokasi yang cukup jauh dari Kawasan Ujung Jabung, namun memiliki akses transportasi yang lengkap. Simpang Desa dan Ujung Jabung dihubungkan oleh jalur rel kereta api dan jalan arteri primer. Pada Simpang Desa ini juga direncanakan akan dibangun stasiun dan terminal penumpang (dijelaskan lebih lanjut pada sub bab rencana sistem jaringan transportasi). Kelengkapan sarana prasarana transportasi tersebut memudahkan mobilisasi penduduk (tenaga kerja) ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Ujung Jabung.

Hierarki dari masing-masing pusat kegiatan ekonomi dalam sistem perkotaan kawasan strategis pantai timur provinsi Jambi yakni sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW adalah pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi yaitu wilayah kabupaten/kota yang berbatasan. Pusat kegiatan wilayah di KSP Pantai Timur berada di Perkotaan Kuala Tungkal. Kuala Tungkal adalah ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat industri pengolahan perikanan, pusat peribadatan dan simpul pelayanan transportasi. Kota Kuala Tungkal juga berfungsi sebagai pusat perkembangan wilayah dan merupakan outlet regional sebagai jalur utama pergerakan karena mempunyai akses untuk melayani pergerakan antar kabupaten dan antar provinsi.

2. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)

PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW. Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp adalah kota-kota yang memenuhi persyaratan sebagai PKL. Perkotaan yang diarahkan menjadi PKW promosi adalah Perkotaan Muara Sabak Barat. Perkotaan Muara Sabak Barat diprediksi akan menjadi pemusatan penduduk karena memiliki prospek perkembangan ekonomi yang signifikan dan diarahkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur perkotaan ini menjadi pusat kegiatan dari pemerintahan, koleksi dan distribusi barang, perdagangan dan jasa regional, industri pengolahan dan transportasi laut. Perkotaan Muara Sabak Barat juga memiliki akses yang baik menuju kawasan lain di Kawasan Strategis Pantai Timur Jambi.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)

PKL dan PKLp adalah ibukota Kabupaten dan kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kecamatan (daerah belakangnya). Dalam rencana yang diarahkan menjadi PKL adalah perkotaan Nipah Panjang, Mendahara Ilir, Perkotaan Muara Sabak Timur dan Pandan Jaya. Sedangkan PKLp adalah Perkotaan Bandar Jaya. Pengembangan PKL dan PKLp diarahkan untuk pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya. Keterkaitan antar PKL dengan daerah sekitarnya dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan dan sungai.

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Dalam rencana, yang diarahkan menjadi PPK adalah Kampung Laut,

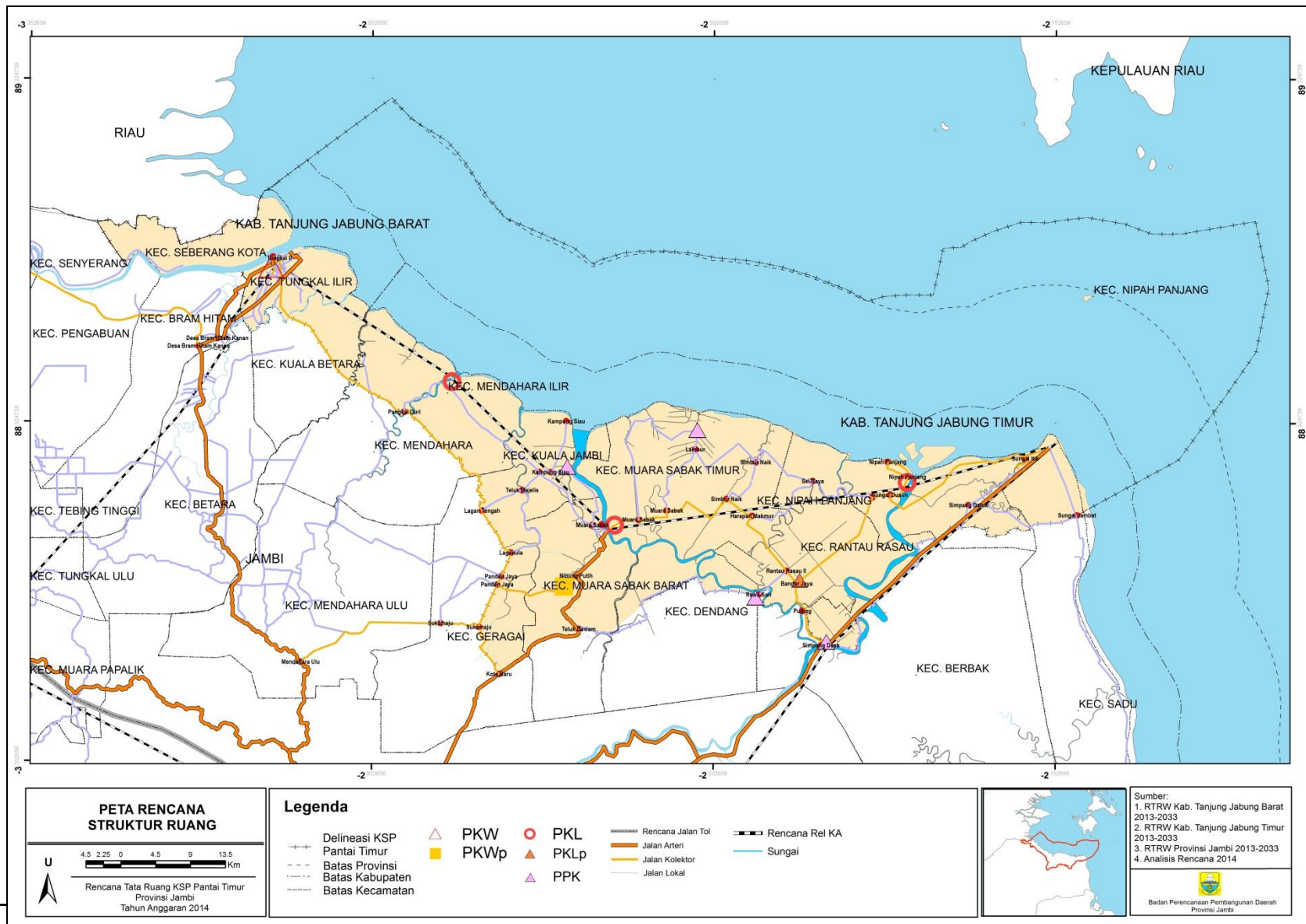
Lambur Luar, Rantau Indah dan Simpang Desa. Pengembangan PPK diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya dan adanya keterkaitan antar PPK dengan daerah sekitarnya melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan dan sungai.

Tabel 4.1
Rencana Pusat Kegiatan dan Pelayanan di Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi

No	Pusat Kegiatan	Hierarki Pelayanan	Kegiatan
1	Kawasan Pelabuhan Ujung Jabung	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pertumbuhan Utama Ekonomi • Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dan Internasional Dalam Jumlah Besar • Permukiman Perkotaan • Industri Perikanan • Sentra Perikanan (minapolitan)
2	Tungkal IV Kota	PKW	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Simpul Jasa Distribusi Barang Dalam Satu Wilayah • Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri • Ibukota Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Kawasan Permukiman Perkotaan
3	Perkotaan Muara Sabak Barat	PKWp	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang • Pusat Perdagangan dan Jasa Regional • Pusat Industri Pengolahan • Pusat Pelayanan Transportasi • Pusat Pendidikan, Kesehatan, olahraga dan wisata
4	Perkotaan Nipah Panjang	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan Kecamatan • Perdagangan dan jasa sub regional • Industri Perikanan • Perhubungan Laut • Sentra Pertanian, Perikanan/Minapolitan • Simpul Transportasi • Permukiman Perkotaan
5	Mendahara Ilir	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan Kecamatan • Pusat Kesehatan, rekreasi, olahraga dan wisata • Pusat Pendidikan dan peribadatan • Simpul Transportasi • Perdagangan dan Distribusi Barang Lokal • Sentra Perikanan/Minapolitan
6	Perkotaan Muara Sabak Timur	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Perikanan • Perhubungan Laut • Sentra Perikanan/Minapolitan • Simpul Transportasi • Sentra pengolahan hasil pertanian • Perdagangan
7	Perkotaan Bandar Jaya (Rantau Rasau)	PKLp	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pertanian • Simpul Transportasi • Pusat Pendidikan dan Olahraga • Pusat Industri Pengolahan
8	Perkotaan Kampung Laut (Kuala Jambi)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pertanian • Simpul Transportasi • Pusat Industri Pengolahan
9	Perkotaan Rantau Indah (Dendang)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pertanian • Simpul Transportasi

No	Pusat Kegiatan	Hierarki Pelayanan	Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata skala lokal
10	Perkotaan Simpang Desa (Berkak)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pertanian • Simpul Transportasi • Budidaya perikanan • Pariwisata • Permukiman Perkotaan
11	Perkotaan Lambur Luar	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pertanian • Sentra Perikanan (Minapolitan)

Sumber: RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat, RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2013-2033) dan Rencana, Tahun 2014



Gambar 4.1 Peta Rencana Struktur Ruang KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.1.2 Sistem Jaringan Transportasi

4.1.2.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi di KSP Pantai Timur pada dasarnya ditujukan untuk menghubungkan antar kawasan di dalam Pantai Timur Jambi, menghubungkan Pantai Timur Jambi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Jambi dan sekitarnya serta menghubungkan Pantai Timur Jambi dengan luar wilayah. Perwujudan jaringan transportasi mendukung terbentuknya akses dengan sistem eksternal sehingga dapat membentuk pasar luar wilayah (eksport) dan import. Perencanaan transportasi mendukung transportasi multi moda, baik antara transportasi darat melalui jalan dan kereta maupun transportasi laut melalui pelabuhan.

a. Jaringan Jalan

Undang-undang Republik Indonesia Prasarana Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan digunakan untuk melayani lalu lintas sarana angkutan yang menyangkut barang dan orang/penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan. Prasarana jalan berfungsi sebagai sektor pendorong berkembangnya sektor-sektor lain sebagai pendukung atau penghubung pada jenjang kota.

Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung sangat memerlukan jalan sebagai penghubung ke kota lain. Selain itu juga sebagai sarana transportasi angkutan barang untuk dikirim keluar pulau maupun aliran barang dari luar menuju Jambi. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelabuhan utama, pelabuhan Ujung Jabung didukung oleh pelabuhan Muara Sabak dan Kuala Tungkal sebagai pelabuhan pengumpul. Selain pelabuhan utama dan pengumpul juga terdapat pelabuhan pengumpan yaitu di Mendahara dan Nipah Panjang. Untuk membentuk sistem kepelabuhan maka memerlukan jaringan transportasi yang mendukung pelabuhan termasuk dari transportasi darat

1). Jalan Arteri

Untuk mencapai Pelabuhan Utama Ujung Jabung, Pelabuhan Pengumpul Muara Sabak dan Kuala Tungkal direncanakan jalan arteri. Ketiga pelabuhan membutuhkan akses yang sangat baik karena akan menjadi pelabuhan yang memiliki kegiatan paling penting di Provinsi Jambi khususnya untuk pelabuhan Ujung Jabung. Jalan arteri primer ini juga sebagai jalan utama mobilitas menuju Kawasan Strategis Pantai Timur yang berasal dari keseluruhan wilayah Provinsi Jambi. Berikut rencana jalan arteri primer menuju ketiga pelabuhan tersebut:

- 1) Kota Jambi – Kota Baru (Kec Muara Sabak Barat) – Teluk Dawam – Nibung Putih – Muara Sabak
- 2) Kota Jambi – Mendahara Ulu – Desa Bram Hitam Kanan – Kuala Tungkal
- 3) Kota Jambi – Simpang Desa – Simpang Datuk – Sungai Lokan – Sungai Itik

2). Jaringan Jalan Kolektor

Jaringan jalan kolektor dibangun untuk menghubungkan antara lokasi penting yang tidak dilayani oleh Jalan Arteri Primer. Berikut rencana jalan kolektor di KSP Pantai Timur Jambi:

- 1) Muara Sabak – Simbur Naik – Harapan Makmur – Rantau Rasau II – Bandar Jaya – Sungai Dusun – Sungai Lokan – Sungai Itik
- 2) Kota Baru (Kec. Muara Sabak Barat) – Pandan Jaya – Laganula – Lagan Tengah – Pangkal Duri – Tungkal Ilir
- 3) Kota Baru (Kec. Muara Sabak Barat) – Sukamaju – Mendahara Ulu
- 4) Pandan Jaya – Nibung Putih
- 5) Simpang Desa – Puding – Bandar Jaya
- 6) Simpang Desa – Simpang Datuk – Sungai Itik
- 7) Sungai Dusun – Nipah Panjang
- 8) Desa Bram Hitam Kanan – Provinsi Riau

3). Jaringan Jalan Lokal

Jaringan jalan lokal dibutuhkan untuk menghubungkan antar kawasan di KSP Pantai Timur yang tidak terlayani jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor. Berikut rencana jalan lokal di KSP Pantai Timur Jambi:

- 1) Muara Sabak – Kampung Siau – Teluk Majelis – Lagan Tengah
- 2) Teluk Majelis – Laganula
- 3) Kampung Siau – Pangkal Duri
- 4) Muara Sabak – Lambur – Simbur Naik – Sei Raya – Sungai Dusun
- 5) Sei Raya – Harapan Makmur
- 6) Teluk Dawam – Rawa Sari – Rantau Rasau II
- 7) Sungai Datuk – Sungai Jambat
- 8) Sungai Jambat – Sungai Cemara

b. Jaringan Prasarana Lalu Lintas

Adapun rencana jaringan prasarana lalu lintas di wilayah KSP Pantai Timur Jambi, meliputi:

- 1) Pengembangan terminal tipe B di Kota Kuala Tungkal
- 2) Pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Muara Sabak Barat
- 3) Pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Nipah Panjang
- 4) Pembangunan terminal tipe C di Simpang Desa
- 5) Pembangunan terminal barang di Simpang Desa

c. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas

Adapun jaringan pelayanan lalu lintas di wilayah KSP Pantai Timur Jambi, meliputi:

- 1) Angkutan penumpang meliputi pengembangan angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan kawasan perdesaan. Pengembangan Antar kota Antar Provinsi (AKAP) dengan jalur Kuala Tungkal – Simpang Tuan, Kuala Tungkal – Merlung, Kuala Tungkal Batanghari. Pengembangan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan jalur Kuala Tungkal –Jambi, Kuala Tungkal – Sialang, Kuala Tungkal – Tebing Tinggi, Kuala Tungkal – Merlung, Kuala Tungkal – Pelabuhan Dagang. Pengembangan angkutan pedesaan (angdes) meliputi Kuala tungkal – Simpang Abadi, Kuala Tungkal – Teluk Nilau, Kuala Tungkal – Sialang, Kuala Tungkal – Tebing Tinggi, Kuala Tungkal – Merlung, Kuala Tungkal – Pelabuhan Dagang, Jalur penghubung antar kecamatan lainnya.
- 2) Pengembangan Angdes dengan rute terminal Muara Sabak – Sabak Ilir – Lembur - Simbur Naik, terminal Muara Sabak – Lembur – Rantau Rasau – Nipah Panjang, terminal Muara Sabak – Kampung Laut Pangkal Bulian PP, terminal Muara Sabak – kompleks perkantoran – Parit Culum – Plabi – Simpang Kiri, terminal Muara Sabak – kompleks perkantoran – Blok D PP, terminal Muara Sabak – Teluk Dawan – Rantau Indah PP, Rantau Rasau – Puding – terminal Simpang Desa – Sungai Lokan, Blok D – Mendahara Ilir, terminal Simpang Desa – Nipah Panjang – Sungai Lokan
- 3) Angkutan barang meliputi pengembangan Simpang Desa – Sungai Lokan. Pengembangan angkutan barang dengan jalur Kuala Tungkal – Terminal Serdang Jaya

d. Jaringan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Adapun rencana pelabuhan di KSP Pantai Timur Jambi adalah:

- 1) Pengembangan pelabuhan Puding di Kecamatan Rantau Rasau
- 2) Pengembangan pelabuhan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi
- 3) Pengembangan pelabuhan Koto Kandis di Kecamatan Dendang
- 4) Pengembangan pelabuhan Sei Lokan di Kecamatan Sadu
- 5) Pengembangan pelabuhan Mendahara Ilir dan Pelabuhan Pangkal Duri di Kecamatan Mendahara
- 6) Pengembangan pelabuhan Lambur Luar dan Pelabuhan Simbur Naik di Kecamatan Muara Sabak Timur

4.1.2.2. Sistem Jaringan Perkeretaapian

a. Jaringan jalur kereta api umum

Pengembangan jalur kereta api umum yang terdapat di kawasan strategis Pantai Timur Jambi meliputi:

- 1) Jalur Jambi - Muara Sabak
- 2) Jalur Rantau Badak – Kuala Tungkal – Muara Sabak
- 3) Jalur Muara Tebo - Merlung – Kuala Tungkal

b. Jaringan jalur kereta api khusus

Pengembangan jalur kereta api khusus yang terdapat di kawasan strategis pantai timur Jambi meliputi:

- 1) Jalur Jambi – Muara Sabak – Ujung Jabung
- 2) Jalur Merlung – Kuala Tungkal – Muara Sabak – Ujung Jabung
- 3) Jalur Merlung – Kuala Tungkal – Muara Sabak

Prasarana perkeretaapian penunjang berupa pembangunan stasiun kereta api Kuala Tungkal, Mendahara Ilir, Muara Sabak Barat, Nipah Panjang, Simpang Desa dan Stasiun Ujung Jabung di Kecamatan Sadu. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.1.2.3 Sistem Jaringan Transportasi Laut

Di KSP Pantai Timur Provinsi Jambi, Sungai Batanghari, Sungai Berbak dan Sungai Mendahara mempunyai peran utama sebagai jalur transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada ketiga sungai tersebut terdapat pelabuhan Muara Sabak, Kampung Laut dan Nipah Panjang. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sungai Pangabuan sebagai jalur transportasi yang terdapat pelabuhan Kuala Tungkal.

Di KSP Pantai Timur Jambi yang mencakup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur terdapat 3 pelabuhan laut yang melayani berbagai macam kegiatan yang mencakup angkutan penumpang dan juga barang. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan Kuala Tungkal, Muara Sabak dan Pelabuhan Pos kampung Laut. Untuk kondisi eksisting pelabuhan Kuala Tungkal adalah pelabuhan paling sibuk baik dalam hal angkutan penumpang ataupun kegiatan ekspor/import. Namun pergerakan penumpang cenderung menurun dari tahun ke tahun dan penurunan mencapai 7%. Sedangkan pelabuhan Muara Sabak memiliki pergerakan arus barang yang selalu mengalami peningkatan positif baik luar ataupun dalam negeri. Pelabuhan Pos Kampung Laut tidak memiliki pergerakan arus barang yang besar bahkan cenderung mengalami penurunan.

Pemikiran pengembangan pelabuhan utama Provinsi Jambi telah semakin mengerucut dari Kuala Tungkal ke Muara Sabak dan di masa depan ke Ujung Jabung yang menyediakan kemudahan untuk disinggahi kapal samudera besar. Kawasan Ujung Jabung sendiri dijadikan sebagai kawasan pelabuhan utama dengan berbagai alasan antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil
2. Ketersediaan sumber daya alam
3. Posisi strategis zona
4. Stabilitas zona (sosial dan politik)
5. Pertumbuhan penduduk usia kerja positif
6. Investasi besar PMDN dan PMA
7. Integrasi dengan MP3EI

a. Konektivitas Pantai Timur Provinsi Jambi Dengan Wilayah Lain

Provinsi Jambi merupakan bagian dari route logistik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik yang telah ditetapkan pada MP3EI (Master Plan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia) maupun konsep TOL LAUT nya Presiden RI 2014-2019, Jokowi (lihat Gambar 1). Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono, route logistic tersebut diberi nama "*Pendulum Nusantara*" atau *Indonesia Main sea Corridor West-East Pendulum*, dan pada saat Presiden Joko Widodo terkenal dengan nama *Tol Laut*. Pendulum Nusantara dan Tol Laut pada prinsipnya sama, hanya Tol laut singgah di Pelabuhan Bitung, sedangkan Pendulum Nusantara dari Makasar langsung ke Sorong. Pelabuhan Utama Tol Laut adalah: (1) Pelabuhan Belawan / Kuala Tanjung, (2) Pelabuhan Batam, (3) Pelabuhan Tanjung Priok, (4) Pelabuhan Tanjung Perak, (5) Pelabuhan Makasar, (6) Pelabuhan Bitung, dan (7) Pelabuhan Sorong.

Ujung Jabung akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Utama (*Main Port*), yang nantinya dihubungkan langsung ke simpul atau pelabuhan utama Tol Laut, yaitu Pelabuhan Batam. Dengan demikian Pelabuhan Ujung Jabung akan menjadi pelabuhan yang sangat penting untuk keluar masuknya barang ke provinsi Jambi

b. Tata letak Pelabuhan

Tata letak pelabuhan di kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi meliputi:

- 1) Pelabuhan utama meliputi Pelabuhan Ujung Jabung

Pelabuhan utama berfungsi sebagai pintu gerbang provinsi Jambi untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Agar Pelabuhan tersebut dapat beroperasi dengan lancar kapal mempunyai

tempat lego jangkar yang aman, dan pelabuhan mempunyai ruang perairan untuk pengembangan maka perlu disediakan ruang perairan yang cukup. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka ruang perairan diusulkan memiliki ruang untuk DLKr/DLKp lingkaran dengan jari-jari, $R = 10,0$ Km dengan pusat di Ujung Jabung

- 2) Pelabuhan pengumpul meliputi Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pelabuhan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir.

Pelabuhan pengumpul memiliki fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Agar Pelabuhan tersebut dapat beroperasi dengan lancar kapal mempunyai tempat lego jangkar yang aman, dan pelabuhan mempunyai ruang perairan untuk pengembangan maka perlu disediakan ruang perairan yang cukup. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka ruang perairan diusulkan memiliki ruang untuk DLKr/DLKp lingkaran dengan jari-jari, $R = 7,50$ Km dengan pusat di masing-masing pelabuhan.

- 3) Pelabuhan pengumpan meliputi Pelabuhan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang dan Pelabuhan Mendahara di Kecamatan Mendahara.

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang memiliki fungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas dan merupakan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi

c. Kawasan Alur

Kawasan Alur merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa atau kabel bawah laut dan jalur migrasi biota laut. Berdasarkan Pedoman Umum Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kabupaten/Kota Tahun 2010 dari Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kawasan Alur yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Alur Pelayaran yang dapat dibagi menjadi 5 (lima) alur pelayaran, yaitu : Alur Pelayaran Lokal, Alur Pelayaran Regional, Alur Pelayaran Nasional, Alur Pelayaran Internasional, dan Alur Pelayaran Industri Tambang.

1) Alur Pelayaran Lokal

Alur Pelayaran Lokal adalah merupakan perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran tradisional. Perairan ini memiliki kedalaman yang cukup aman untuk dilayari. Alur ini merupakan alur pelayaran kapal-kapal nelayan lokal menuju ke daerah penangkapan dan kembali ke lokasi

demaga (pelabuhan) tempat pelelangan ikan. Kemudian Alur Pelayaran Lokal ini juga digunakan untuk transportasi barang dan orang (penumpang) antar desa atau kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut rencana alur pelayaran lokal di KSP Pantai Timur:

- a. Pelabuhan Mendahara Ilir – Pelabuhan Muara Sabak
- b. Pelabuhan Muara Sabak – Pelabuhan Nipah Panjang
- c. Pelabuhan Nipah Panjang – Pelabuhan Ujung Jabung
- d. Pelabuhan Ujung Jabung – Pelabuhan Labuhan Pring

2) Alur Pelayaran Regional

Alur Pelayaran Regional adalah merupakan perairan yang dialokasikan untuk pelayaran regional, yaitu pelayaran antar kabupaten/kota dalam provinsi dalam angkutan penumpang atau barang. Alur Pelayaran regional di KSP Pantai Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Kuala Tungkal – Pelabuhan Mendahara Ilir
- b. Pelabuhan Kuala Tungkal – Pelabuhan Muara Sabak
- c. Pelabuhan Kuala Tungkal – Pelabuhan Nipah Panjang
- d. Pelabuhan Kuala Tungkal – Pelabuhan Ujung Jabung

3) Alur Pelayaran Nasional

Alur Pelayaran Nasional adalah merupakan perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran nasional atau pelayaran antar provinsi dalam angkutan penumpang atau barang. Alur Pelayaran Nasional berangkat dari dan kembali ke Pelabuhan Samudera Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak, pelabuhan Kuala Tungkal di Tungkal Ilir dan Pelabuhan Samudera Tanjung Jabung di Kecamatan Sadu. Alur pelayaran nasional di KSP Pantai Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Ujung Jabung – Batam - Sumatera bagian utara
- b. Pelabuhan Ujung Jabung – Batam - Pulau Jawa – Provinsi Nusa Tenggara Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur – Provinsi Maluku
- c. Pelabuhan Ujung Jabung – Batam - Pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi
- d. Alur Pelayaran Penyeberangan dengan jalur Kuala Tungkal – Kepulauan Riau – Provinsi Riau

4) Alur Pelayaran Internasional

Alur Pelayaran Internasional adalah merupakan perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran internasional atau pelayaran antar negara dalam angkutan barang ekspor dan import. Alur Pelayaran Internasional berangkat dari dan kembali ke Pelabuhan Tanjung Jabung di Kecamatan Sadu menuju negara-negara Asia Timur, Asia Barat dan Eropa seperti Hongkong,

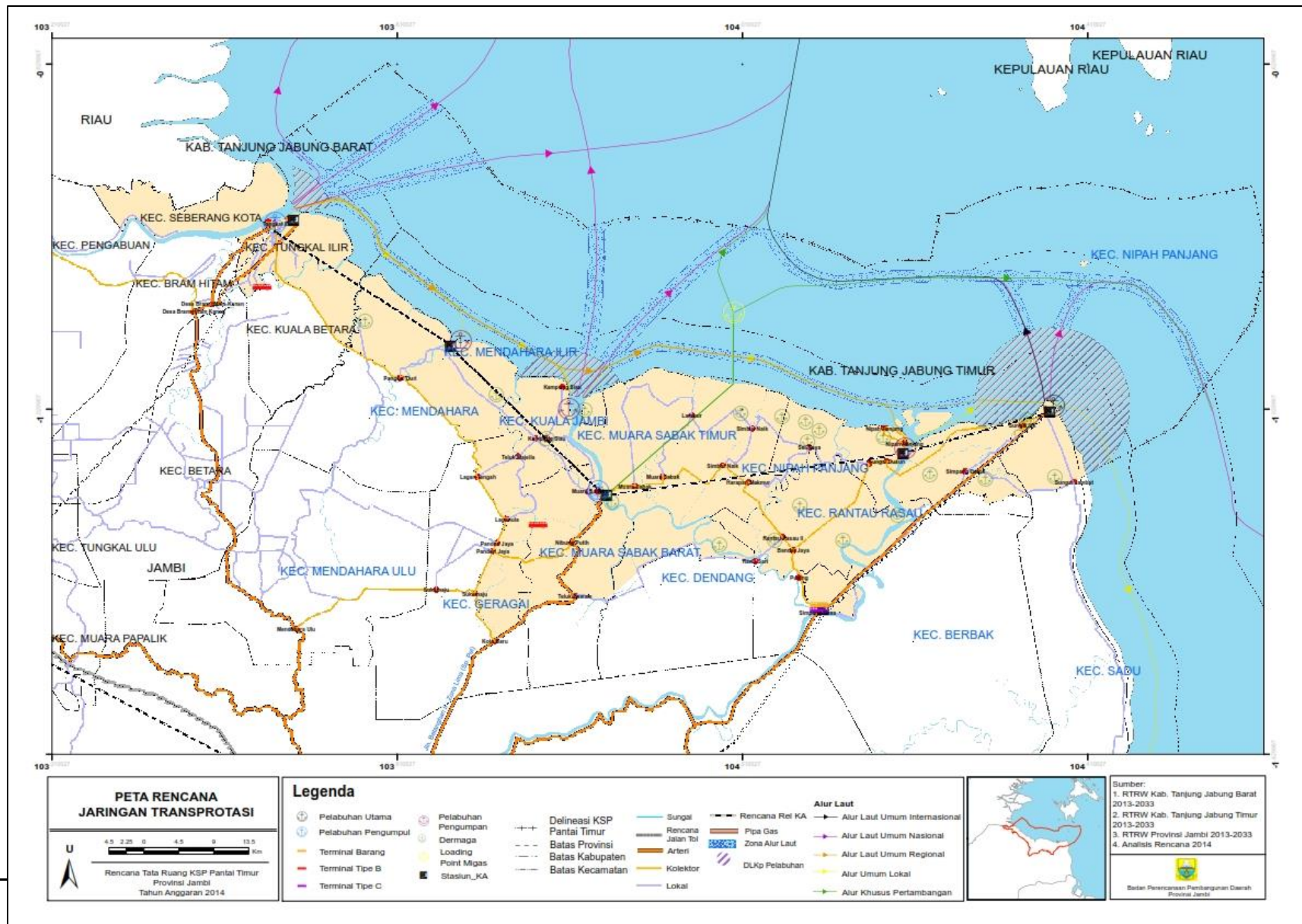
Jepang, Cina, Amerika Serikat, Hindia, Arab dan lainnya. Berikut alur pelayaran internasional KSP Pantai Timur:

- a. Pelabuhan Ujung Jabung - Batam – Asia Tenggara – Asia Timur
- b. Pelabuhan Ujung jabung – Batam – Asia Bagian Barat – Eropa Timur

5) Alur Pelayaran Khusus Pertambangan

Alur Pelayaran khusus pertambangan adalah merupakan perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran industri tambang, yang bisa pelayaran antar provinsi dan antar negara dalam angkutan hasil pertambangan dalam hal ini migas dan batu bara. Alur Pelayaran Industri Tambang ini khususnya migas dilayari oleh kapal-kapal tanker migas untuk membawa hasil produksi perusahaan PT Petrochina. Alur pelayaran khusus pertambangan ini dimulai dari Muara Sabak menuju tujuan masing-masing sesuai dengan keinginan produsen tambang

Prasarana kepelabuhan penunjang berupa pengembangan demaga pelabuhan terutama Muara Sabak dan Nipah Panjang, peningkatan fasilitas bongkat muat di pelabuhan Muara Sabak dan Nipah Panjang dan meningkatkan pelayanan administrasi.



Gambar 4.2 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.1.3 Sistem Jaringan Energi

4.1.3.1 Eksplorasi Minyak dan Gas

Wilayah konsesi eksplorasi minyak dan gas, berada di kedua kabupaten. Kilang minyak terdapat di Kecamatan Geragai tepatnya di dekat Desa Legan Tengah. Sedangkan titik sumur tambang banyak terdapat di Kecamatan Bram Itam selain itu juga terdapat wilayah pertambangan lepas pantai di sebelah utara Kecamatan Kuala Jambi.

Pemanfaatan sumberdaya minyak dan gas ini telah dilakukan oleh dua operator, yaitu Petronas dari Malaysia dan Petrochina dan China. Petronas masih dalam tahap eksplorasi di lepas pantai, sedangkan Petrochina sudah eksploitasi di darat.

Saat ini eksploitasi yang dilakukan masih kecil dan masih dalam tahap uji coba sumur produksi darat belum termasuk di wilayah pesisir dan laut atau sepanjang pantai. Perencanaan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi di Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Pematang Lumut – Serdang Jaya – Desa Bram Hitam Kanan – Kuala Tungkal
- b. Simpang Mencolok – Sukamaku – Pandan Lagan – Pandan jaya – Lagan Ula – Lagan Tengah – Teluk Majelis

4.1.3.2 Pembangkit Tenaga Listrik

Pembangkit tenaga listrik di Kawasan Strategis Pantai Timur Jambi meliputi:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di daerah terpencil Kecamatan Sadu, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi dan Tungkal VKota (Kecamatan Seberang Kota).
2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Kecamatan Muara Sabak, Kecamatan Nipah Panjang, Simbur Naik, Sungai Raya, Kampung Laut, Mendahara, Kecamatan Sadu tetap difungsikan sampai terkoneksi dengan Sistem Interkoneksi Sumatera.
3. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan interkoneksi jaringan listrik Sumatera ke seluruh kecamatan dalam Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi.
4. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tungkal I terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir dan pembangunan PLTU 2 x 400 Megawatt di Kecamatan Sadu.

4.1.3.3 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

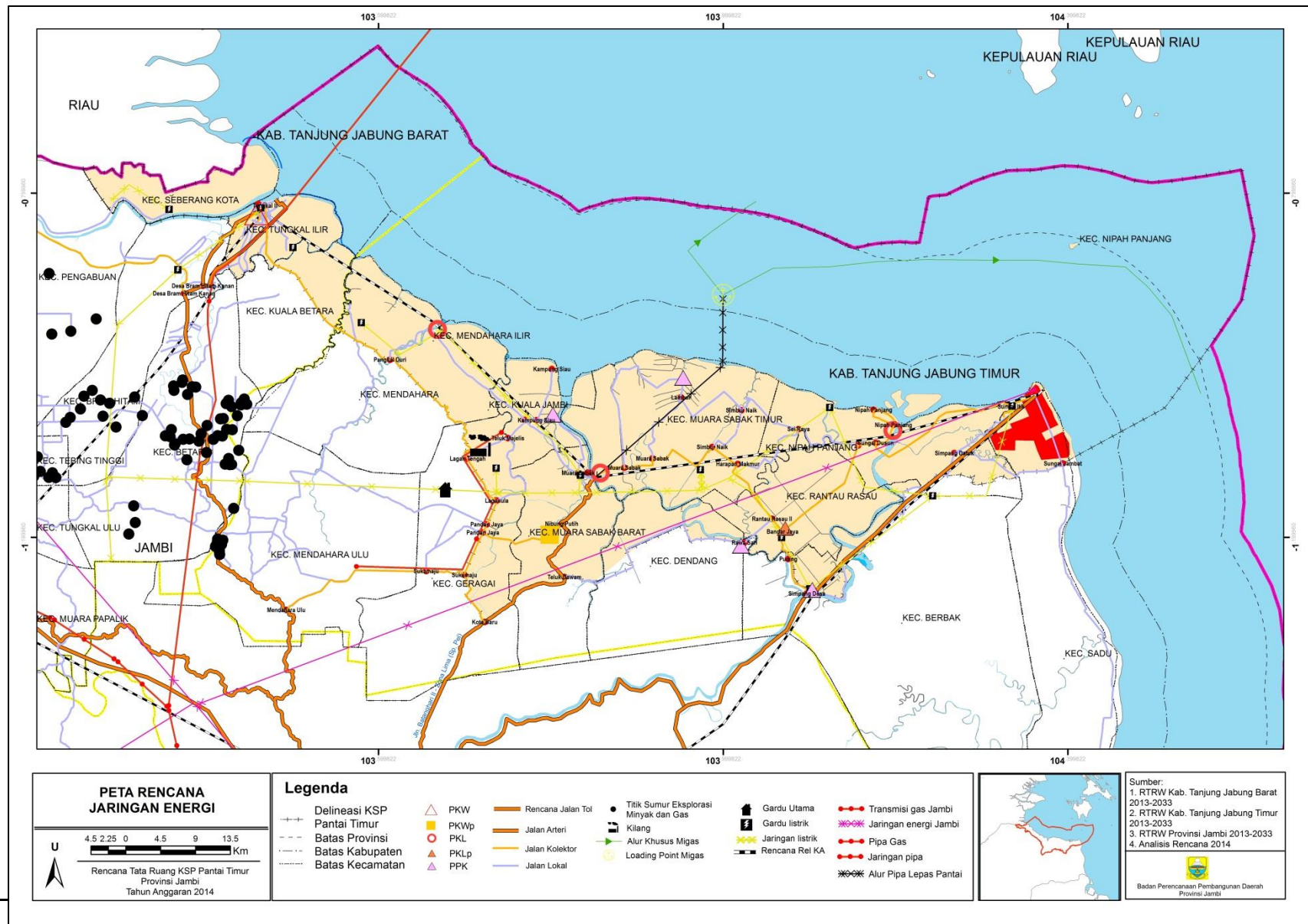
Kondisi eksisting menunjukkan terjadi pemanfaatan energi yang tidak efisien. Susut atau hilang daya listrik di 8 kecamatan KSP Pantai Timur sebesar 3.464.313 Kwh atau sebesar 15,36%

dari total produksinya. Sehingga listrik yang dihasilkan banyak yang hilang dan masih banyak kawasan seperti di desa Pangkal Duri, Desa Alang-alang, Siau Dalam, Sungai Ular, Kota Harapan, Rantau Karya dan Manga Mulya yang belum teraliri listrik interkoneksi. Dalam rencana penetapan transmisi tenaga listrik ditetapkan dengan beberapa kriteria antara lain:

- 1) Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan terisolasi
- 2) Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman

Rencana jaringan transmisi tenaga listrik KSP Pantai Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Rantau Rasau; Dusun Bruo Desa Sungai Tering di Kecamatan Nipah Panjang; Mendahara-Sungai Tawai di Kecamatan Mendahara
- 2) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20kVA yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3) Pengembangan gardu induk dengan kapasitas 150 kV terdapat di Tungkal V kecamatan Seberang Kota, Tungkal Harapan dan Tungkal IV Kota di Kecamatan Tungkal Ilir
- 4) Penempatan gardu listrik di Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu
- 5) Pengembangan gardu utama di Kecamatan Geragai
- 6) Pengembangan jaringan listrik dengan distribusi:
 - a) Muara Sabak – Harapan Makmur - Nipah Panjang – Berbak – Sungai Itik
 - b) Muara Sabak – Harapan makmur – Bandar Jaya – Simpang Desa – Berbak
 - c) Muara Sabak – Pangkal Duri
 - d) Muara Sabak – Lagan Ula – Pematang Lumut – Kec. Seberang Kota
- 7) Pengembangan jaringan energi trans Sumatera dengan distribusi:
 - a) Sumatera Selatan – Simpang Kiri – Sungai Itik
- 8) Pengembangan jaringan transmisi gas jambi dengan jalur Pematang Lumut – Serdang Jaya – Desa Bram Hitam Kanan - Kuala Tungkal dan jalur Simpang Mencilok – Sukamaku – Pandan Lagan – Pandan Jaya – Lagan Ula – Lagan Tengah – Teluk Majelis
- 9) Pengembangan *Loading Point Migas* lepas pantai dan jaringan pipa gas bawah laut yang ada di lepas pantai utara Desa Simbur Naik.
- 10) Pengembangan kilang minyak yang terdapat di Kecamatan Geragai



Gambar 4.3 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.1.4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Kondisi eksisting menunjukan masih ada desa di KSP Pantai Timur Jambi yang belum terjangkau jaringan seluler BTS yaitu:

Tabel 4.3 Wilayah yang Belum Terjangkau Jaringan Seluler BTS

No	Kecamatan	Nama Desa
1	Kuala Betara	Betara Kiri
2		Sungai Dualap
3	Muara Sabak Timur	Sungai Ular
4		Kota Raja
5		Siau Dalam
6		Alang-alang
7	Kuala Jambi	Manunggal Makmur
8		Kuala Lagan
9	Mendahara	Pangkal Duri
10	Rantau Rasau	Rasau 1
11		Karya Bakti
12		Sungai Dusun
13	Nipah Panjang	Simpang Dusun
14		Bunga Tanjung
15		Simpang Jelita

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur Tahun 2012

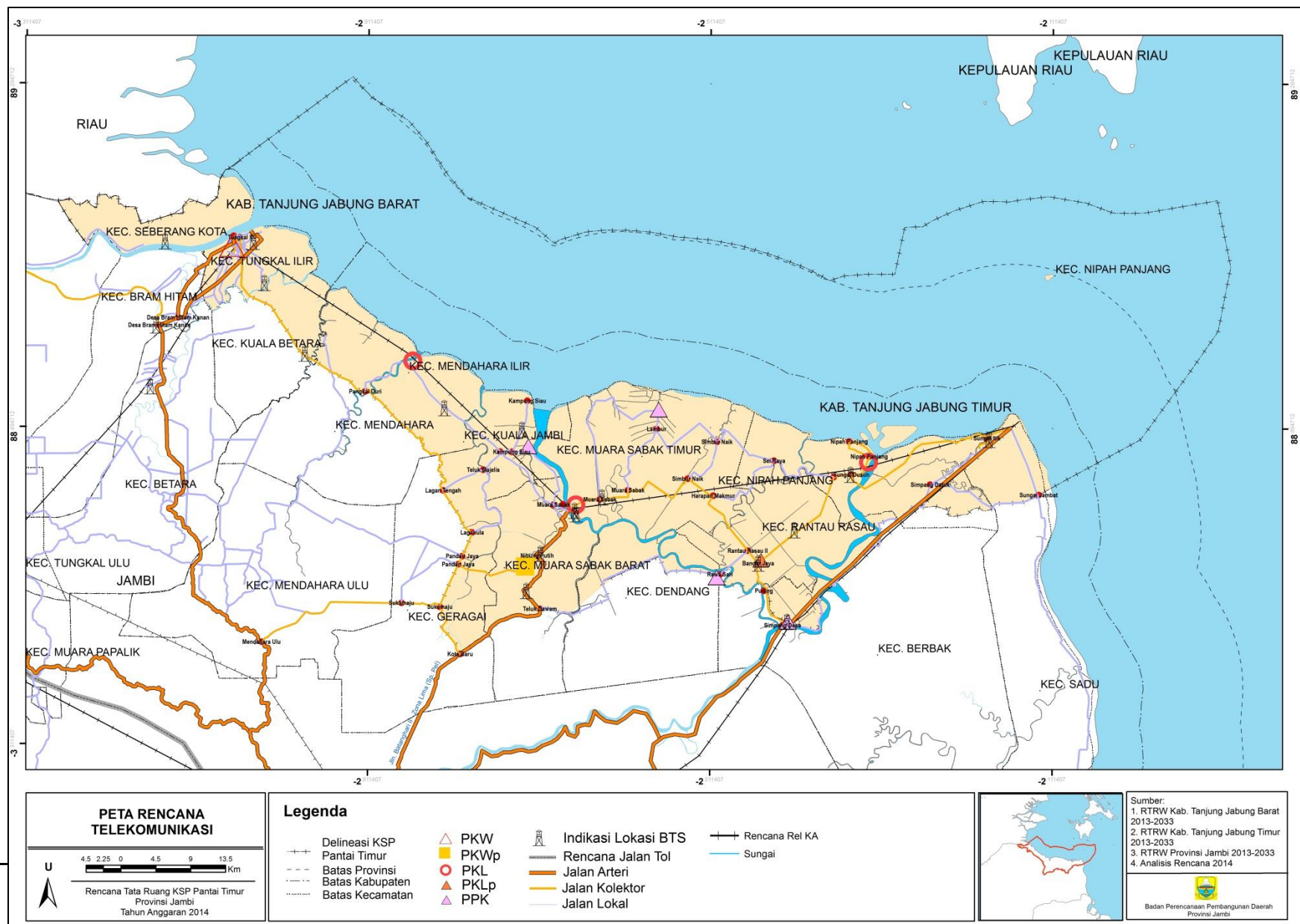
Untuk memenuhi pelayanan seluruh kawasan jaringan terrestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh KSP Jambi Pantai Timuryakni meliputi:

a. Sistem Kabel

Pengembangan jaringan kabel pada seluruh Kecamatan di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi

b. Sistem Nirkabel

Penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) meliputi seluruh Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi. Sistem jaringan telepon nirkabel dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama



Gambar 4.4 Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.1.5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

4.1.5.1. Irigasi

Saluran drainase di KSP Pantai Timur Jambi dipahami sebagai cara untuk mengatur air untuk mengairi lahan pertanian melalui pintu air. Untuk pemenuhan air bagi lahan pertanian dapat dipenuhi sepanjang musim karena sebagian kawasan dipengaruhi oleh arus pasang surut. Pada waktu pasang pintu air dibuka dan ditutup pada waktu surut. Penggunaan pintu air ini tentunya tidak sembarangan agar air yang masuk dan keluar sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Jaringan irigasi yang terdapat di KSP Pantai Timur terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Seberang Kota. Irigasi yang ada digunakan untuk mengalir sawah terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau dan Sadu yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.1.5.2 Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Pelayanan air bersih di KSP Pantai Timur dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh PDAM Tirta Pangabuan. Adanya pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Pangabuan dimulau sejak tahun 1980/1981 dengan pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) di Kuala Tungkal, sehubungan dengan pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung menjadi 2 kabupaten, maka PDAM Tirta Pangabuan memiliki dua daerah pelayanan. Jaringan Air Baku untuk air bersih yang melayani Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi meliputi;

1. Pengembangan sumber sungai Batanghari di Danau Situ dengan IPA di Kecamatan Rantau Rasau dan Sadu untuk melayani Kecamatan Rantau Rasau, Nipah Panjang, Muara Sabak Timur dan Sadu
2. Pengembangan sumber sungai Niur dengan IPA di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu untuk melayani Kecamatan Muara Sabak Timur, Muara Sabak Barat dan Mendahara Ilir
3. Pengembangan sumber air Sungai Pangabuan dengan IPA di Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Tungkal Ilir melayani Kecamatan Seberang kota dan Kecamatan Tungkal Ilir
4. Pengembangandan pengolahan sumber dari Pematang Lumut dengan IPA di Kecamatan Tungkal Ilir dan Mendahara Ulu untuk melayani Kec Tungkal Ilir dan Mendahara Ilir

Pembangunan bangunan penangkap air untuk kebutuhan air bersih perlu direncanakan secara berkesinambungan agar berdaya guna dan berhasil guna dengan pelaksanaan operasi dan

pemeliharaan yang tepat dan benar. Oleh karena itu untuk membangun bangunan *intake* yang direncanakan adalah bangunan *intake* bebas yang memanfaatkan debit air dari danau pulau Sako. Bangunan *intake* di desain dengan menggunakan tipikal bangunan *intake* bebas, dengan dimensi bangunan sebagai berikut:

- a) Lebar bangunan: 1250 m
- b) Tinggi bangunan : 3250 m
- c) Debit aliran sungai: 5788 m³/detik

Sedangkan untuk bak penampung direncanakan berdasarkan kebutuhan air baku untuk penduduk sekitar yang besarnya adalah 1723 m³/detik. Untuk melayani kebutuhan air tersebut direncanakan bak penampung dengan kapasitas 5m³ dengan dimensi sebagai berikut:

- a) Tinggi tampungan: 1,5 m
- b) Panjang tampungan: 2,5 m
- c) Lebar tampungan: 2m
- d) Muka air: 1m
- e) Volume tampungan: 5000 liter

4.1.5.3 Sistem Pengendalian Daya Rusak Air

1. Sistem Pengendalian Daya Rusak Air di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Timur berupa pembangunan tanggul melalui Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur
2. Normalisasi kawasan aliran sungai yang terdapat di sungai Betara Kiri Kecamatan Tungkal Ilir
3. Pengembangan turap di Kuala Tungkal
4. Penempatan pintu air di Kelurahan Tungkal III di Kecamatan Tungkal Ilir.

4.1.5.4 Sistem Jaringan Drainase

Jaringan drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas.

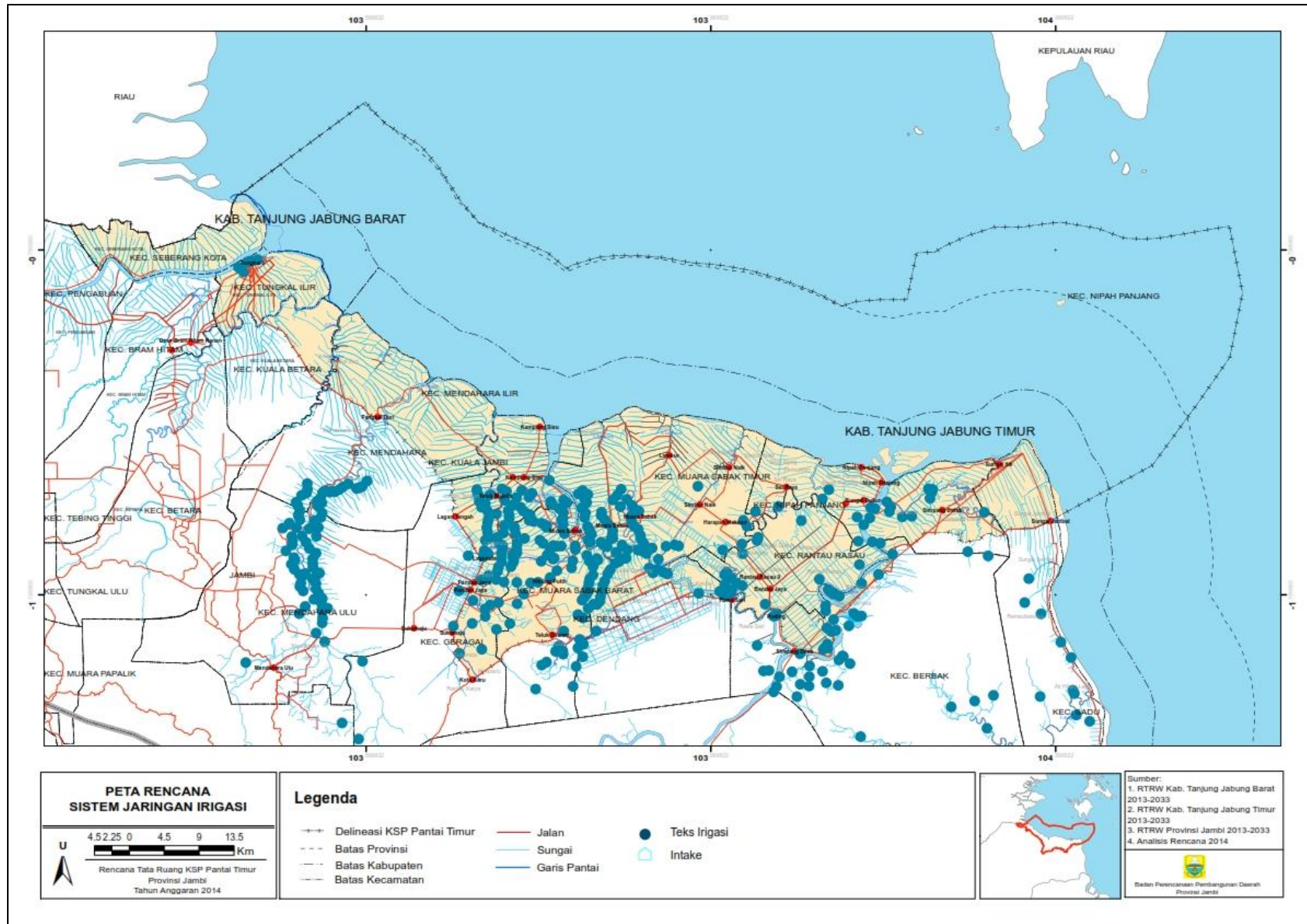
Rencana sistem jaringan drainase di wilayah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Timur Provinsi Jambi berupa saluran drainase primer, baik alami maupun buatan, yang mengalirkan air ke badan air (sungai-sungai). Badan air yang menjadi muara jaringan drainase primer tersebut meliputi:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

- a) Sungai Pengabuan;
- b) Sungai Betara;
- c) Sungai Pangkal Duri;
- d) Sungai Lumahan;
- e) Sungai Baung;
- f) Sungai Dasal;
- g) Sungai Pengabuan;
- h) Sungai Luntuk;
- i) Sungai Langir;
- j) Sungai Asam;
- k) Sungai Tantang;
- l) Sungai Pisapuan; dan
- m) Sungai Senyerang.

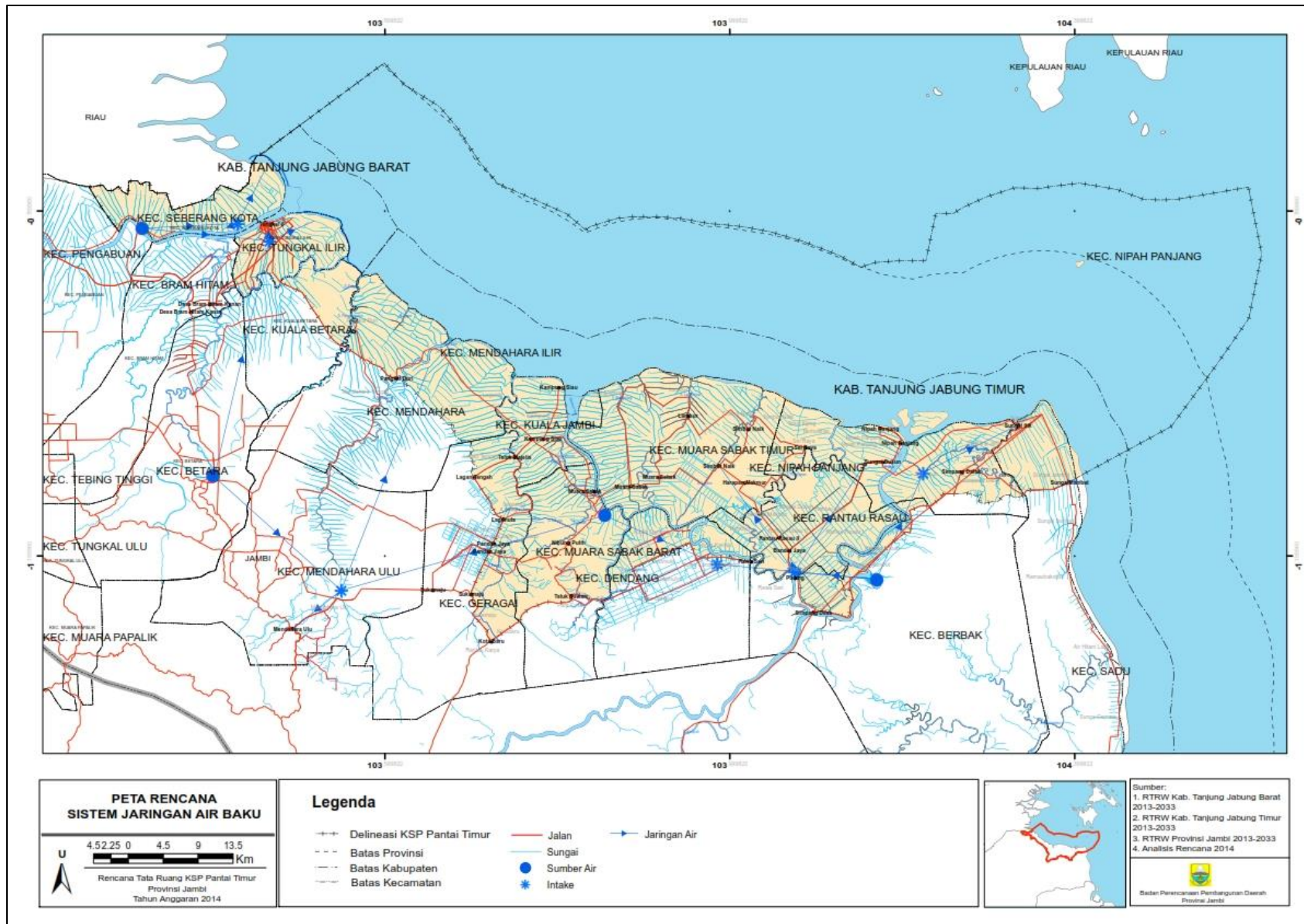
2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

- a) Sungai Batanghari;
- b) Sungai Batang Berbak;
- c) Sungai Mendahara;
- d) Sungai Pangkalan;
- e) Sungai Duri;
- f) Sungai Lagan;
- g) Sungai Pamusiran;
- h) Sungai Sadu;
- i) Sungai Simpang Jelita;
- j) Sungai Simpang Datuk; dan
- k) Sungai Air Hitam Laut.



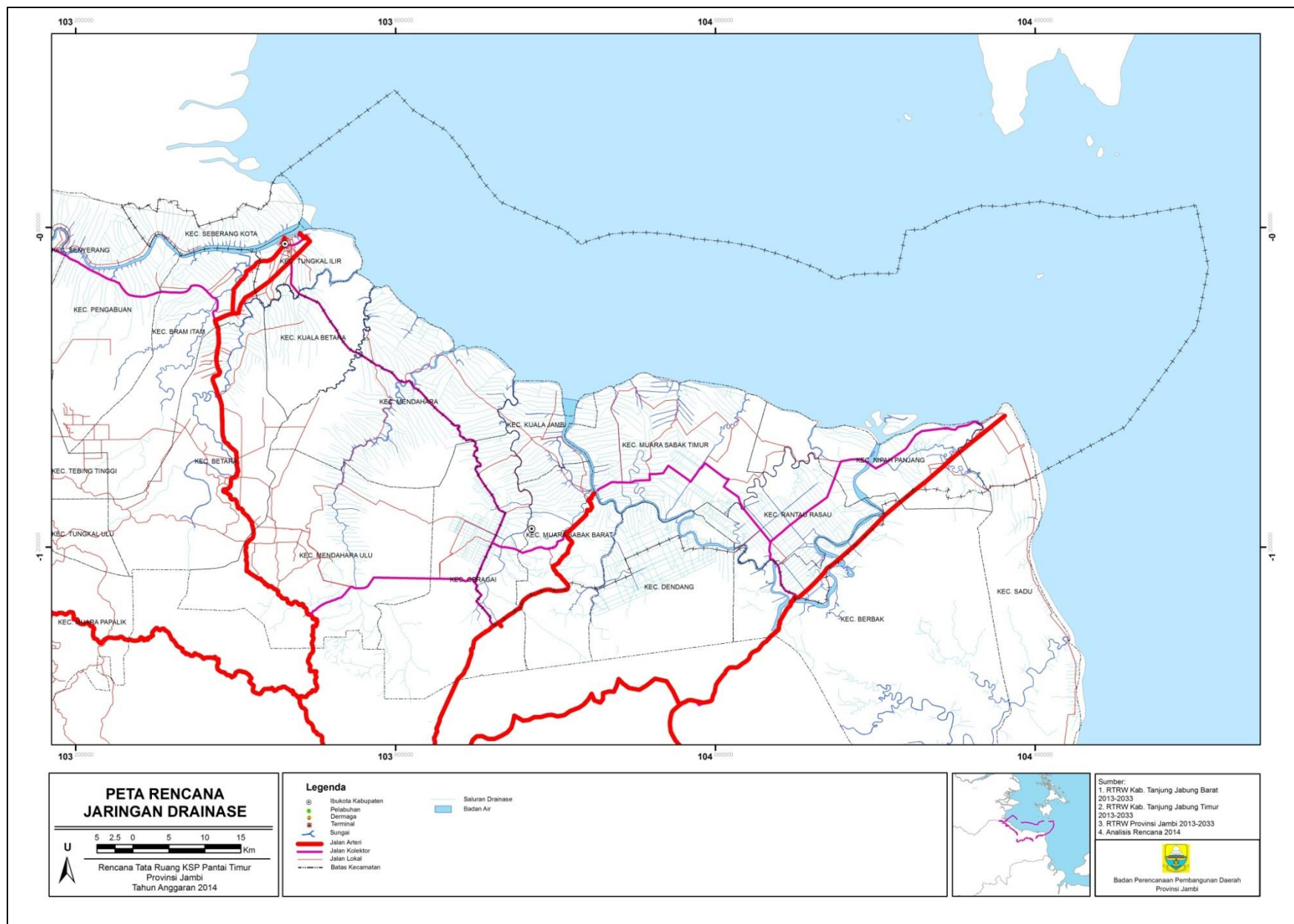
Gambar 4.5 Peta Rencana Sistem Jaringan Irigasi KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014



Gambar 4.6 Peta Rencana Sistem Jaringan Air Baku KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014



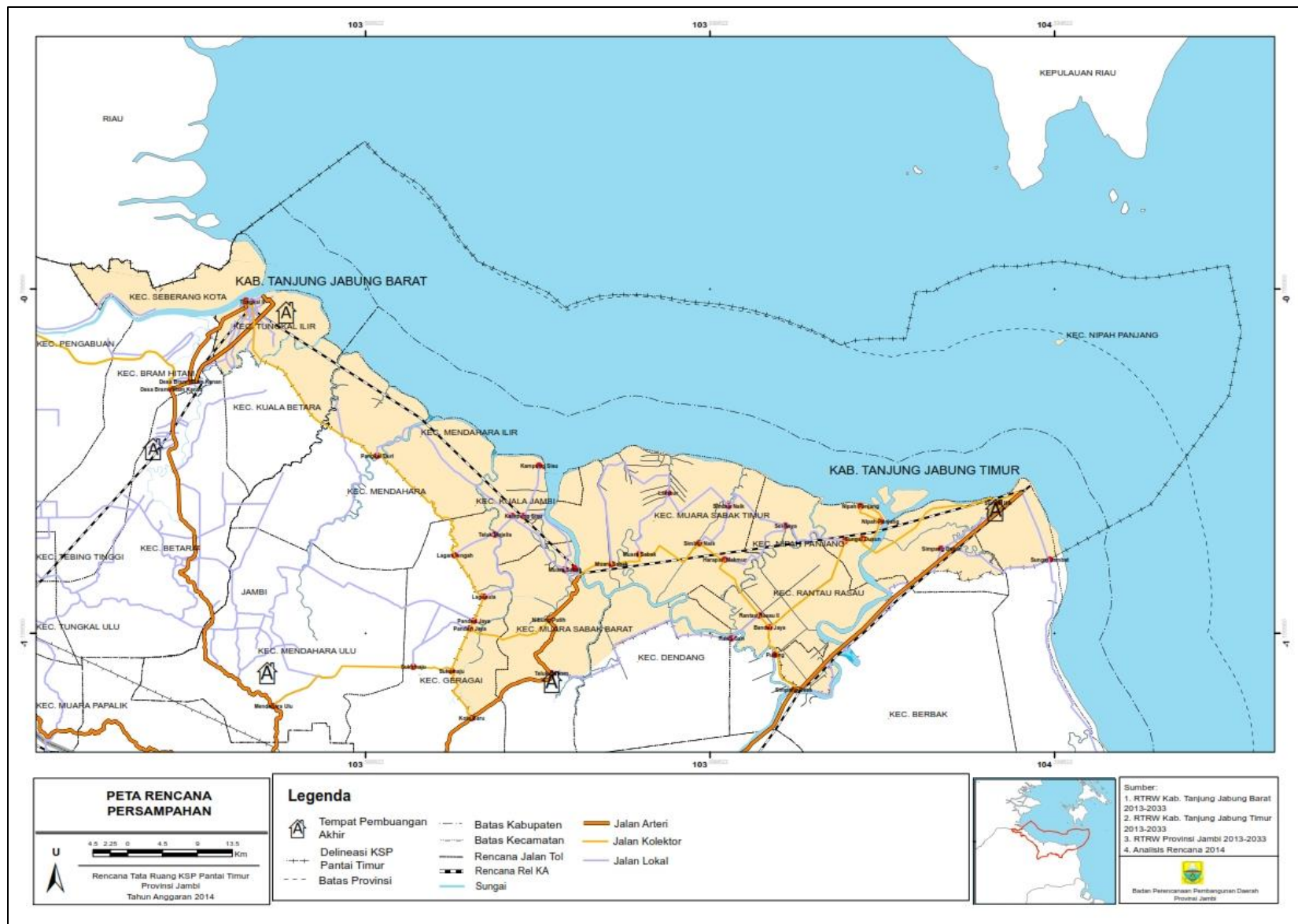
Gambar 4.6 Peta Rencana Jaringan Drainase KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.1.6 Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Sistem persampahan di Kawasan Strategis Pantai Timur berupa:

1. Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Parit Culum I dengan sistem lahan urug terkendali (*controlled landfill*) di Kecamatan Muara Sabak Barat melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebagian Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang;
2. Pembangunan TPAdi Kecamatan Sadu untuk Kecamatan Sadu dan Berbak;
3. Pembangunan TPAdi Kecamatan Tungkal Ilir untuk melayani Kecamatan Tungkal Ilir, Seberang Kota; dan
4. Pembangunan TPAdi Kecamatan Mendahara Ulu untuk melayani Kecamatan Mendahara Ulu dan Mendahara Ilir.



Gambar 4.8 Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.2 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berikut rencana pola ruang di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Jambi.

4.2.1 Rencana Zona Lindung

Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun rencana zona lindung yang diarahkan pada Rencana Tata Ruang KSP Pantai Timur Jambi ini, meliputi zona lindung pantai dan perairan laut, hutan lindung gambut, dan sempadan sungai. Berikut penjabaran rencana zona lindung di KSP Pantai Timur Jambi.

4.2.1.1 Zona Lindung Pantai dan Perairan Laut

Zona lindung pantai dan perairan laut merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistem pantai dan laut, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Zona lindung pantai dan perairan laut di KSP Pantai Timur Jambi ini mencakup sempadan pantai, kawasan hutan bakau (*mangrove*), konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan konservasi perairan lainnya.

Adapun alokasi rencana penetapan zona lindung pantai dan perairan laut ini sebagai berikut.

Tabel 4.4 Rencana Penetapan Kawasan Lindung Pantai dan Perairan Laut di KSP Pantai Timur Jambi

No.	Kecamatan	Luas (Ha)*
Kab. Tanjung Jabung Barat		
1	Seberang Kota	2724.47
2	Tungkal Ilir	3059.18
3	Kuala Betara	403.85
Total		6187.49
Kab. Tanjung Jabung Timur		
1	Nipah Panjang	156.05
2	Muara Sabak Timur	703.57
3	Kuala Jambi	270.99
4	Mendahara	1164.65
Total		2295.25
Total Keseluruhan		8482.75
<i>*Luas dihitung menggunakan ArcGIS</i>		

Sumber: Rencana, 2014

Adapun perlakuan yang diarahkan pada perwujudan rencana zona lindung pantai dan perairan laut KSP Pantai Timur Jambi adalah:

a) Pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai berupa jalur hijau adalah selebar 100 m dari pasang tertinggi ke arah daratan dengan tujuan menjaga lokasi sedapat mungkin tetap pada kondisi alami, melindungi sedapat mungkin flora dan fauna endemik dan lingkungan alam, dan mempertahankan nilai-nilai lingkungan seperti DAS, sumber air masyarakat atau kawasan konservasi alam. Arahkan rencana sempadan pantai di KSP Pantai Timur Jambi ini berupa kawasan hutan bakau (*mangrove*) yang tumbuh di sepanjang pesisir dan berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan. Ditinjau kelestarian fungsi pantai dan fungsi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut maka fungsi ekosistem mangrove mencakup fungsi fisik adalah menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut/abrasi, intrusi air laut, mempercepat perluasan lahan, dan mengolah bahan limbah; fungsi biologis adalah tempat pembenihan ikan, udang, tempat pemijahan beberapa biota air, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota; dan fungsi ekonomi adalah sumber bahan bakar, pertambakan, tempat pembuatan garam, bahan bangunan, dan lain-lain. Kawasan sempadan pantai di KSP Pantai Timur Jambi ini juga diarahkan sebagai zona konservasi kepiting, udang, dan kerang darah mengingat potensinya yang terdapat di wilayah ini.

b) Penetapan dan pemantapan fungsi konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil

Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Permen Kelautan dan Perikanan No 17/Men/2008). Tujuan ditetapkannya konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya. Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,

dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah tersebut secara berkelanjutan. Zona konservasi ini ditetapkan pada sepanjang pesisir KSP Pantai Timur Jambi dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya.

c) Penetapan dan pemantapan fungsi konservasi perairan

Zona Konservasi Perairan adalah merupakan wilayah perairan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah tersebut secara berkelanjutan. Zona Konservasi Perairan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), yang terdiri dari KKLD Sinoran di Kecamatan Mendahara dan KKLD Lambur Lestari di Kecamatan Muara Sabak Timur dengan luas masing-masing KKLD adalah 100 Ha. Dasar hukum pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan SK Bupati No. 376 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, zona ini direncanakan di DPL (Daerah Perlindungan Laut) Pangkal Babu yang juga sekaligus direncanakan untuk pengembangan wisata alam pantai, hutan mangrove, dan mengkombinasikan wisata budidaya (pemancingan) di kawasan daratnya.

- d) Pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak merusak fungsi lindung.
- e) Pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai.
- f) Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami.
- g) Perlindungan pantai dari erosi dan abrasi.
- h) Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya.
- i) Pengaturan akses publik.
- j) Pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- k) Rehabilitasi pada kawasan lindung pantai yang mengalami kerusakan.
- l) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan lindung pantai.

4.2.1.2 Zona Hutan Lindung Gambut

Zona hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam penetapan kawasan lindung pada RTR KSP Pantai Timur Jambi ini, zona kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung berupa hutan lindung gambut.

Zona hutan lindung gambut merupakan kawasan hutan gambut yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya. Zona hutan gambut ini juga rawan terhadap kebakaran. Penyebaran api dilahan gambut tidak mengikut

arah angin. Titik api justru berada di kedalaman lebih 2 meter. Pada kawasan gambut rembetan api akan meluas kesegala arah dan sulit diperkirakan penyebarannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar, mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produksi tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut, dan udara. Oleh karena itu, pengembangan KSP Pantai Timur Jambi dibatasi atau tidak diarahkan pada hutan gambut yang ada. Jadi, dalam hal ini perlakuan yang diarahkan pada penetapan zona hutan gambut adalah sebagai kawasan yang dipertahankan dan sangat dilimitasi perubahan fungsinya.

Adapun alokasi rencana penetapan zona hutan lindung gambut ini sebagai berikut.

Tabel 4.5 Rencana Penetapan Zona Hutan Lindung Gambut di KSP Pantai Timur Jambi

No.	Kecamatan	Luas (Ha)*
Kab. Tanjung Jabung Barat		
1	Seberang Kota	375.01
2	Kuala Betara	251.98
Total		626.99
Kab. Tanjung Jabung Timur		
1	Nipah Panjang	266.39
2	Mendahara	169.78
3	Geragai	384.98
4	Berbak	352.06
5	Muara Sabak Barat	2744.71
Total		3917.93
Total Keseluruhan		4544.92
*Luas dihitung menggunakan ArcGIS		

Sumber: Rencana, 2014

Adapun perlakuan yang diarahkan dalam perwujudan zona hutan lindung gambut adalah:

- Pemantapan fungsi zonan hutan lindung gambut.
- Pengaturan akses publik.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan zona hutan lindung gambut.

4.2.1.3 Zona Sempadan Sungai

Zona sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan ditetapkannya zona sempadan sungai adalah

untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat merusak air sungai, fisik tepi, dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Dalam RTR KSP Pantai Timur Jambi ini, sempadan sungai ditetapkan selebar 50-100 meter di kiri dan kanan sungai yang berada di luar kawasan permukiman, dan 10-15 meter di kiri dan kanan sungai yang berada di dalam kawasan permukiman.

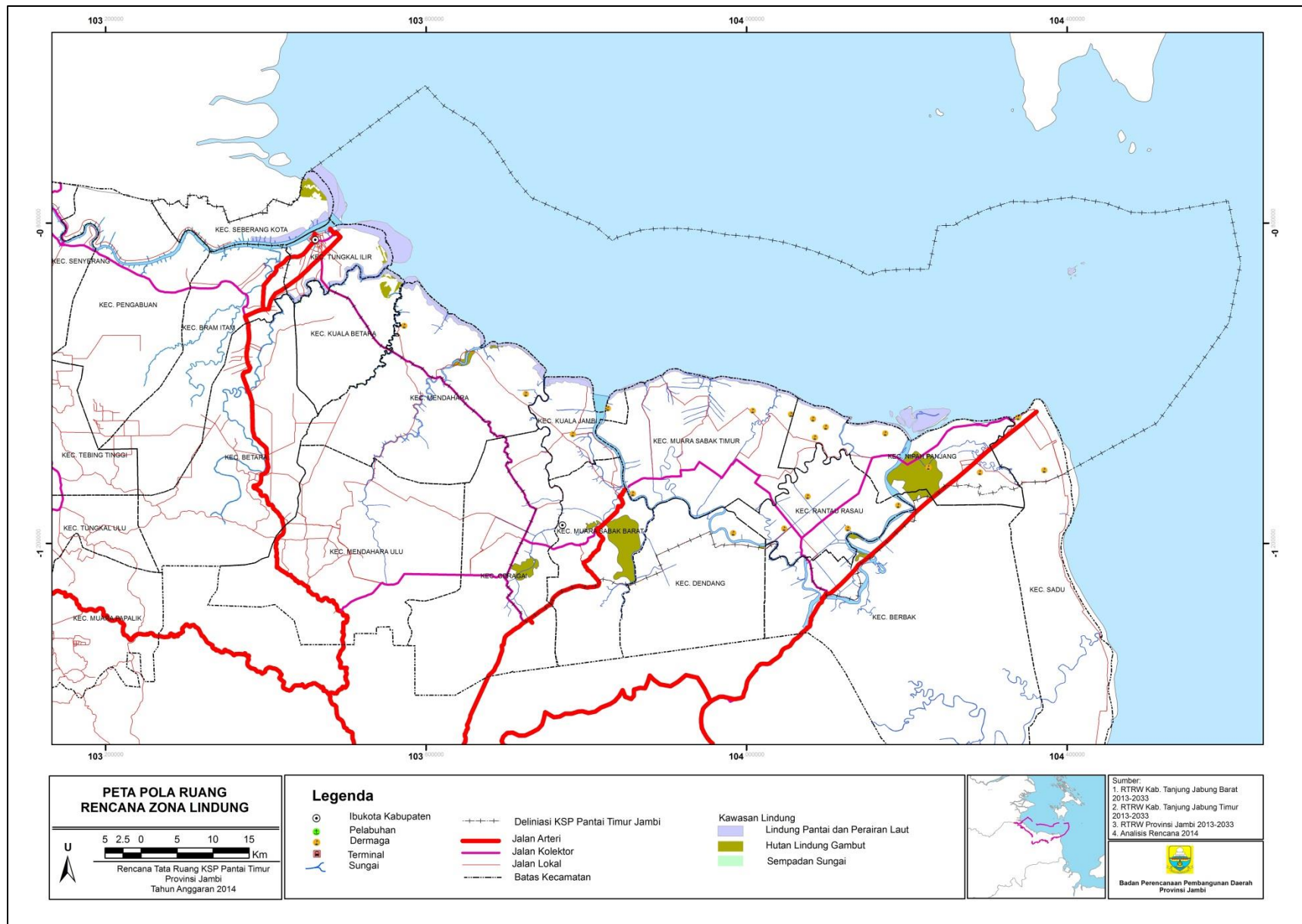
Tabel 4.6 Kedalaman dan Lebar Alur Sungai di KSP Pantai Timur Jambi

No.	Nama Alur Sungai	Kedalaman Sungai (m)	Kelebaran Alur (m)	
			Maks.	Min.
1	Batang Hari	4 - 12	200	70
2	Batang Berbak	8 - 10	80	50
3	Mendahara	6 - 7	120	70
4	Sadu	5 - 6	30	20
5	Lagan	5 - 6	65	25
6	Air Hitam Laut	8 - 10	90	60
7	Pemusiran	4 - 5	45	25
8	Tungkal/Pengabuan	td	458	380
9	Betara	td	84	53

Sumber: Kondisi Sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika -
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012

Adapun perlakuan yang diarahkan dalam perwujudan zona lindung sempadan sungai adalah:

- Pemantapan fungsi pada zona sempadan sungai.
- Pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan/atau permukiman.
- Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor.
- Pembangunan prasarana pariwisata.
- Penerbitan bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.



Gambar 4.9 Peta Rencana Zona Lindung KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.2.2 Rencana Zona Budidaya

Zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adapun rencana zona budidaya yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang KSP Pantai Timur Jambi, meliputi zona pertanian (zona pertanian umum dan zona perikanan), zona permukiman, zona industri, dan zona pertambangan (migas).

4.2.2.1 Zona Pertanian

Zona pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan untuk memenuhi kriteria budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Zona pertanian yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang KSP Pantai Timur Jambi, meliputi zona pertanian umum dan zona perikanan.

a. Zona Pertanian Umum

Zona pertanian umum adalah zona budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan dikembangkan sebagai lahan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. Zona pertanian umum yang diarahkan dalam RTR KSP Pantai Timur Jambi ini terdiri atas zona lahan pertanian pangan berkelanjutan dan zona pertanian.

1. Pertanian Pangan Berkelanjutan

Zonapertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hampan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hampan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan pada RTR KSP Pantai Timur Jambi ini seluruhnya berupa pertanian lahan basah, yakni sawah.

Adapun alokasi rencana penetapan zona pertanian pangan berkelanjutan ini sebagai berikut.

Tabel 4.7 Rencana Penetapan Zona Pertanian Pangan Berkelanjutan di KSP Pantai Timur Jambi

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
Kab. Tanjung Jabung Barat		
1	Seberang Kota	8925.40
2	Tungkal Ilir	105.57
3	Kuala Betara	3357.70
Total		12388.66
Kab. Tanjung Jabung Timur		
1	Nipah Panjang	4634.99
2	Muara Sabak Timur	8844.65

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
3	Kuala Jambi	556.25
4	Mendahara	213.26
5	Geragai	796.93
6	Muara Sabak Barat	3043.64
7	Dendang	4057.74
8	Berbak	3644.16
9	Rantau Rasau	11566.53
10	Sadu	1039.42
Total		36860.81
Total KSP		50786.23

Sumber: Rencana, 2014

Adapun perlakuan yang diarahkan dalam perwujudan rencana zona pertanian pangan berkelanjutan di KSP Pantai Timur Jambi ini, antara lain:

- Penetapan zona pertanian lahan basah.
- Peningkatan jaringan irigasi
- Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian.
- Penguatan kelembagaan petani terkait pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran.
- Pengembangan zona pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.
- Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap tanah terlantar dan kawasan lahan marginal.
- Optimalisasi lahan pangan, melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi lahan pertanian pangan.

Intensifikasi dilakukan dengan cara, yakni: 1) peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan; 2) penyediaan bibit unggul; 3) penyediaan kebun induk; 4) pengembangan pusat perbenihan; 5) pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit; 6) pengembangan irigasi; dan 7) pengembangan inovasi pertanian. Pengembangan inovasi pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian, penyuluhan pertanian, dan/atau jaminan akses permodalan.

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan dilakukan dengan cara, yakni: 1) pemanfaatan lahan sub optimal; 2) pemanfaatan lahan terlantar; dan 3) pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan. Pemanfaatan lahan sub optimal yang dimaksud adalah pemanfaatan terhadap lahan pasang surut dan lahan rawa lebak. Pemanfaatan lahan terlantar yang dimaksud adalah pemanfaatan yang dilakukan terhadap tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan sesuai dengan

sifat dan tujuan pemberian hak dan terhadap tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan yang dimaksud adalah pemanfaatan yang dilakukan terhadap lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan dan lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

Diversifikasi lahan pertanian pangan dilakukan dengan cara, yakni: 1) pola tanam; 2) tumpang sari; dan/atau 3) sistem pertanian terpadu.

- i) Pengelolaan konservasi lahan dan air dilakukan dengan pengelolaan tanah dan manajemen tata air.

2. Pertanian

Lahan pertanian yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa kawasan pertanian lahan kering, seperti kebun atau tegalan, dan juga kegiatan pertanian lainnya seperti peternakan. Zona pertanian lahan kering adalah kawasan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan sebagai pasokan kebutuhan air bagi tanaman atau tidak tersedia sumber air khusus yang digunakan untuk kegiatan pertaniannya. Zona pertanian lahan kering yang ditetapkan pada RTR KSP Pantai Timur Jambi ini adalah kebun dan/atau perkebunan. Jenis tanaman kebun dan/atau perkebunan yang diusahakan di KSP Pantai Timur Jambi adalah kelapa, kelapa dalam, pinang, kelapa sawit, dan kopi.

Adapun alokasi rencana penetapan zona pertanian ini sebagai berikut.

Tabel 4.8 Rencana Penetapan Zona Pertanian di KSP Pantai Timur Jambi

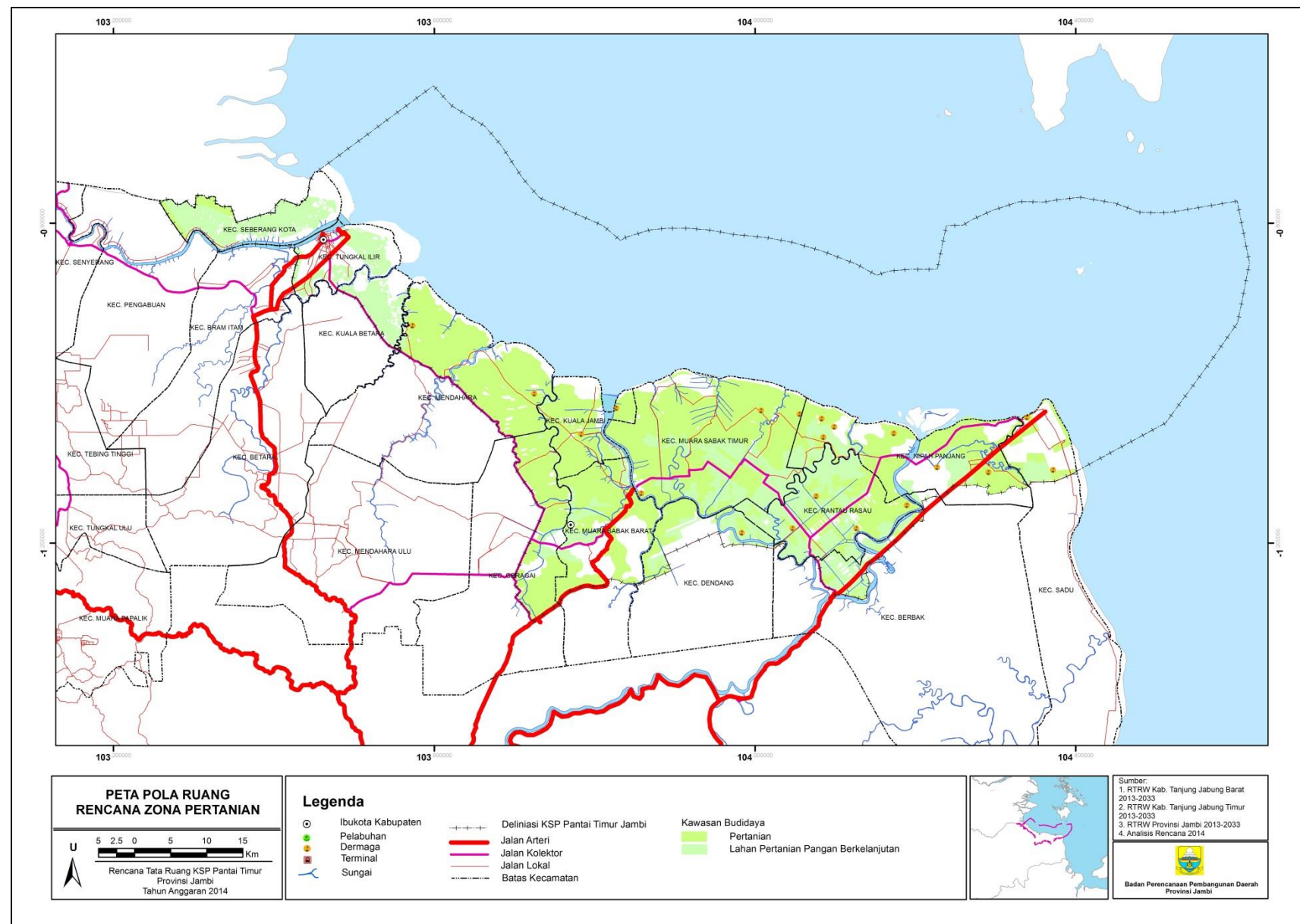
No.	Kecamatan	Luas (Ha)
Kab. Tanjung Jabung Barat		
1	Seberang Kota	8925.3989
2	Tungkal Ilir	3940.705193
3	Kuala Betara	3357.69552
Total		16223.79961
Kab. Tanjung Jabung Timur		
1	Nipah Panjang	14273.63155
2	Muara Sabak Timur	28110.98361
3	Kuala Jambi	1599.354938
4	Mendahara	19261.22311
5	Geragai	10425.45062
6	Muara Sabak Barat	11222.25639
7	Dendang	3303.204209
8	Berbak	719.8216
9	Rantau Rasau	7656.622981
10	Sadu	2453.762543

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
Total		99026.31155
Total Keseluruhan		115250.1112

Sumber: Rencana, 2014

Adapun perlakuan yang diarahkan dalam perwujudan rencana zona pertanian di KSP Pantai Timur Jambi ini, antara lain:

- a) Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan.
- c) Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran.
- d) Pengembangan sentra perkebunan.



Gambar 4.10 Peta Rencana Zona Pertanian KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

b. Zona Perikanan

Zona perikanan adalah zona budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Zona perikanan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang KSP Pantai Timur Jambi meliputi zona perikanan tangkap dan zona perikanan budidaya.

5. Zona Perikanan Tangkap

Zona perikanan tangkap adalah perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap. Zona perikanan tangkap yang diarahkan pada RTR KSP Pantai Timur Jambi ini, terdiri atas: a) perikanan tangkap I a, yakni perikanan tangkap untuk 0-2 mil laut; b) perikanan tangkap I b, yakni perikanan tangkap untuk 2-4 mil laut; dan c) perikanan tangkap II, yakni perikanan untuk 4-12 mil laut. Jenis ikan yang menjadi sasaran pada zona perikanan tangkap I a dan I b (0-4 mil laut) adalah belanak, sembilang, gulamah, bawal hitam, udang dogol, udang kuning, dan udang ketak. Jenis ikan yang menjadi sasaran pada zona perikanan tangkap II adalah ikan kembung, layang, bawal putih, bawal hitam, kakap/bambangan, udang putih, udang dogol, dan udang kuning.

Adapun alokasi rencana penetapan zona perikanan tangkap ini sebagai berikut.

Tabel 4.9 Rencana Penetapan Zona Perikanan Tangkap di KSP Pantai Timur Jambi

No.	Keterangan	Luas (Ha)*
1	Perikanan Tangkap I a (0-2 mil laut)	24113.19
2	Perikanan Tangkap I b (2-4 mil laut)	26701.00
3	Perikanan Tangkap II (4-12 mil laut)	130255.00
Total		181069.20
*Luas dihitung menggunakan ArcGIS		

Sumber: Rencana, 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER/02/MEN/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap, berikut adalah arahan untuk perwujudan kegiatan perikanan tangkap di KSP Pantai Timur Jambi:

- 1) Jalur penangkapan ikan ialah jalur penangkapan ikan I dengan batas 0 sampai dengan 6 mil laut, terbagi atas :
 - b. Jalur 0 sampai 2 mil laut diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan alat penangkap ikan menetap dan alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi, kapal perikanan tanpa motor dan panjang kapal kurang dari 10 meter.
 - c. Jalur 2 sampai dengan 4 mil laut diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan :

- Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi.
 - Kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel dengan ukuran kurang dari 12 meter atau kurang dari 5 Gross T on.
 - Pukat cincin (purse seine) dengan ukuran kurang dari 150 m.
 - Gillnet dengan hanyut kurang dari 1000 meter.
- 2) Jalur penangkapan ikan II dengan batas perairan diluar jalur penangkapan I sampai 12 mil ke arah laut, dengan kualifikasi peralatan:
- Kapal perikanan motor dengan maksimum 60 GT .
 - Menggunakan pukat cincin, maksimum 600 meter (1 kapal), maksimum 1000 m (2 kapal).
 - Jaring insang hanyut (maksimum 2500 m).
- 3) Jalur penangkapan III dengan batas perairan diluar jalur penangkapan II sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengan kualifikasi peralatan :
- Kapal perikanan berbendera Indonesia, maksimum 200 GT .

Selain itu, apabila merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No: 02/MEN/2011, tentang jalur operasi penangkapan alat tangkap, maka alat tangkap yang ada sekarang di KSP Pantai Timur Jambi memang harus dialihkan pada jalur penangkapan diatas 4 mil. Jalur operasi penangkapan dari jenis alat tangkap yang ada di Wilayah KSP Pantai Timur Jambi menurut Permen No: 02/MEN/2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.10 Jalur Operasi Alat Penangkapan Ikan
di Wilayah KSP Pantai Timur Jambi**

No	Alat Tangkap		Jalur Operasi Penangkapan			
	Jenis	Spesifikasi	0–2 mil	2–4 mil	4–12 mil	> 12 mil
1.	Lampara Dasar	Mesh size \geq 1,75 inch, P. Tali ris atas \leq 30 m	DL	OK	OK	OK
2.	Pukat tarik ikan pantai	Mesh size \geq 1 inch, P. Tali ris atas \leq 300 m	OK	DL	DL	DL
3.	Pukat hela pertengahan berpapan (trawls)	Mesh size \geq 2 inch, P. Tali ris atas \leq 60 m	DL	DL	DL	OK
4.	Dogol	–	DL	OK	OK	OK
5.	Jaring insang hanyut	P \leq 500 m	DL	OK	OK	OK
		P \leq 1000 m	DL	OK	OK	OK
		P \leq 2500 m	DL	DL	DL	OK
6.	Jaring insang tetap	P \leq 500 m	DL	OK	OK	OK
		P \leq 1000 m	DL	DL	OK	OK
7.	Jaring insang lingkaran	–	DL	OK	OK	DL
8.	Rawai dasar	M.Pancing \leq 800 mata	DL	OK	OK	OK
		M.Pancing \leq 1500 mata	DL	DL	OK	OK
		M.Pancing \leq 2000 mata	DL	DL	DL	OK
9.	Pancing ulur	–	OK	OK	OK	OK
10.	Pancing berjoran	–	OK	OK	OK	OK
11.	Bubu	\leq 300 buah	OK	OK	OK	DL

No	Alat Tangkap		Jalur Operasi Penangkapan			
	Jenis	Spesifikasi	0–2 mil	2–4 mil	4–12 mil	> 12 mil
12.	Togo	P.Tali ris ≤ 20 m	OK	DL	DL	DL
13.	Jermal	$P \leq 10$ m, $L \leq 10$ m	OK	DL	DL	DL
14.	Tombak	–	OK	OK	OK	DL
15.	Jala tebar	Luas ≤ 20 m ²	OK	DL	DL	DL

Keterangan : OK = Diperbolehkan; DL = Dilarang dioperasikan

Sumber : Permen Kelautan & Perikanan RI No: PER.02/MEN/2011

Manajemen upaya penangkapan umumnya dilakukan dengan pembatasan jumlah dan ukuran kapal (fishing capacity), jumlah waktu penangkapan (vessel usage) atau upaya penangkapan (fishing effort). Pengendalian ini lebih mudah dan lebih murah dari sisi pemantauan dan penegakan aturan dibandingkan pengendalian hasil tangkapan. Namun penentuan jumlah upaya masing-masing unit penangkapan merupakan hambatan dalam memakai aturan pengendalian ini.

2. Zona Perikanan Budidaya

Zona perikanan budidaya merupakan zona pesisir yang digunakan untuk kegiatan budidaya. Zona ini ditetapkan mulai batas sempadan pantai sampai ke arah darat. Perikanan budidaya ini mencakup perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya kolam, dan perikanan budidaya jaring apung/keramba. Komoditas unggulan pada perikanan budidaya tambak adalah udang windu, udang vaname, dan bandeng. Komoditas unggulan pada perikanan budidaya kolam adalah ikan nila, patin, bawal air tawar, gurami, dan lele. Sedangkan komoditas unggulan pada perikanan budidaya jaring apung/keramba adalah ikan patin, nila tomang, dan udang galah.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lokasi-lokasi yang direncanakan sesuai untuk kegiatan perikanan budidaya ini adalah di Desa Tungkal I, Desa Tungkal III, Desa Tungkal IV, dan Desa Tungkal V di Kecamatan Tungkal Ilir, serta Desa Sungai Dualap dan Desa Betara Kanan di Kecamatan Betara. Pada saat ini pemanfaatan potensi pengembangan budidaya tambak baru seluas 1.004 Ha dengan pola teknologi tradisional plus, dengan produktivitas yang masih cukup rendah (± 1 Ton/Ha/Tahun). Usaha perikanan budidaya (tambak) ini diharapkan dapat dikembangkan ke arah pola semi intensif. Pola intensif tidak tepat dikembangkan di wilayah ini karena kurangnya daya dukung lahan.

Begitu juga dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lima kecamatan yang berada di pesisir kabupaten ini, yakni Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu, memiliki potensi budidaya tambak udang dan bandeng. Akan tetapi, berdasarkan analisis kesesuaian yang dilakukan pada penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kecamatan-kecamatan tersebut pada umumnya tidak layak untuk kegiatan budidaya tambak udang. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas air/perairan kabupaten ini (seperti salinitas, derajat keasaman,

kandungan padatan tersuspensi, oksigen terlarut, amoniak, nitrit, asam sulfida, logam-logam berat) dan kondisi fisika dan kimia tanah (tekstur, pH, kandungan unsur hara, dan lainnya) tidak memenuhi syarat untuk pengembangan budidaya tambak udang. Demikian juga bila dilihat parameter sosial ekonomi seperti kemudahan akses dan kedekatan dengan pasar ternyata juga pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk lokasi kegiatan budidaya tambak udang. Hasil analisis kesesuaian lahan untuk kegiatan budidaya tambak bandeng juga menunjukkan beberapa lokasi tidak terlalu layak untuk tambak bandeng. Namun demikian, pada lokasi-lokasi tersebut masih dapat dilakukan kegiatan budidaya tambak bandeng dengan melakukan suatu perbaikan terhadap fisika dan kimia air dan tanah calon lokasi tambak, sehingga dengan demikian produktivitas tambak tersebut bisa lebih baik atau maksimal, tetapi bila tidak dilakukan penanganan parameter kualitas air dan tanah tersebut, maka produksi tambak bandeng tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain produksinya rendah.

Adapun alokasi rencana penetapan zona perikanan budidaya ini sebagai berikut.

Tabel 4.11 Rencana Penetapan Zona Perikanan Budidaya di KSP Pantai Timur Jambi

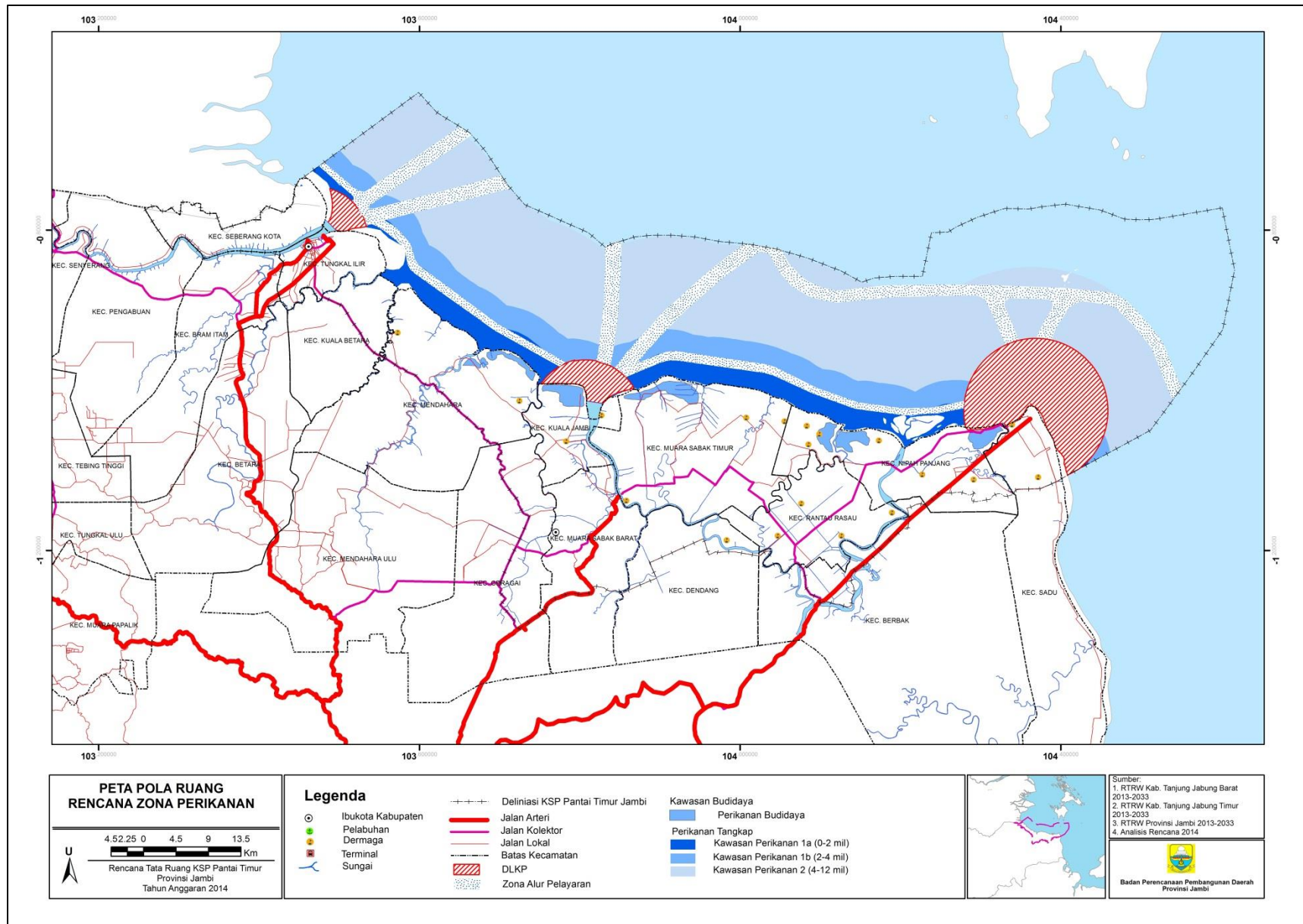
No.	Kecamatan	Luas (Ha)*
Kab. Tanjung Jabung Barat		
1	Seberang Kota	1024.78
2	Tungkal Ilir	1757.91
3	Kuala Betara	1348.31
Total		4131.00
Kab. Tanjung Jabung Timur		
1	Nipah Panjang	2312.67
2	Muara Sabak Timur	1478.28
3	Kuala Jambi	1135.74
4	Mendahara	848.02
Total		5774.72
Total KSP		9905.71
*Luas dihitung menggunakan ArcGIS		

Sumber: Rencana, 2014

Adapun perlakuan yang diarahkan terhadap perwujudan zona perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya adalah:

- Penetapan zona perikanan tangkap dan budidaya.
- Perbaikan kondisi fisika dan kimia air dan tanah yang akan menjadi lokasi pertambakan, terutama udang dan bandeng.

- c) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perikanan, terutama untuk meningkatkan kemudahan akses dan kedekatan dengan pasar untuk menunjang pemasaran hasil budidaya ikan.
- d) Penyediaan dan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).
- e) Pengembangan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- f) Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
- g) Penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran.
- h) Pengembangan kawasan minapolitan, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sudah memiliki potensi lebih terkait perikanan budidaya. Kawasan minapolitan ini memiliki fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.



Gambar 4.11 Peta Rencana Zona Perikanan KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.2.2.2 Zona Permukiman

Zona permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman yang diarahkan dalam rencana tata ruang KSP Pantai Timur Jambi ini mencakup zona perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan sarana penunjang kegiatan lainnya. Pada Rencana Tata Ruang KSP Pantai Timur Jambi ini, penetapan kawasan permukiman yang cukup intensif diarahkan pada pusat-pusat kegiatan, terutama di Tungkal Ilir (PKW), Muara Sabak Barat (PKWp), serta Nipah Panjang dan Sadu (PKNp Kawasan Ujung Jabung).

Adapun alokasi rencana penetapan zona permukiman secara lebih rinci sebagai berikut.

Tabel 4.12 Rencana Penetapan Zona Permukiman di KSP Pantai Timur Jambi

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	
		Permukiman Perkotaan	Permukiman Perdesaan
Kab. Tanjung Jabung Barat			
1	Seberang Kota	0.00	97.52
2	Tungkal Ilir	5200.00	204.37
3	Kuala Betara	0.00	98.37
Total		5200.00	400.26
Kab. Tanjung Jabung Timur			
1	Nipah Panjang	506.54	2658.94
2	Muara Sabak Timur	156.21	274.69
3	Kuala Jambi	67.56	143.82
4	Mendahara	78.27	400.18
5	Geragai	941.75	1009.15
6	Muara Sabak Barat	2232.76	537.77
7	Dendang	3601.08	253.94
8	Berbak	320.31	186.17
9	Rantau Rasau	205.53	320.49
10	Sadu	181.22	15.22
	Ujung Jabung	10.00	0.00
Total		8301.23	5800.36
Total KSP		13501.23	6200.62

Sumber: Rencana, 2014

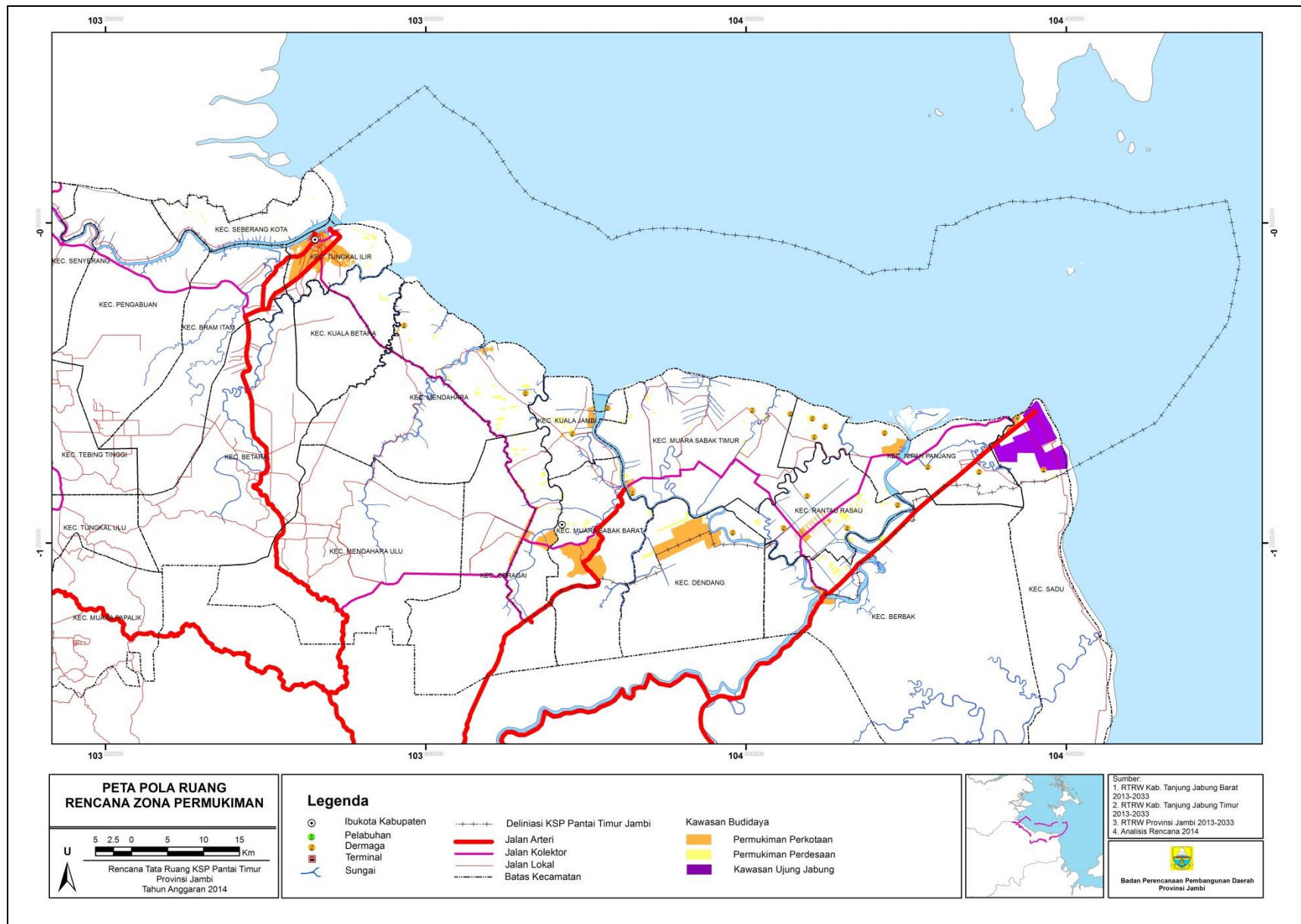
Adapun perlakuan yang diarahkan pada perwujudan rencana zona permukiman ini adalah:

- a) Pengembangan permukiman perkotaan di:

Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

- 1) kawasan permukiman perkotaan Tungkal IV Kota, kawasan permukiman perkotaan Tungkal II, kawasan permukiman perkotaan Tungkal III dan Perkotaan Tungkal Harapan di kecamatan Tungkal Ilir;

- 2) kawasan permukiman perkotaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota;
 - 3) kawasan permukiman perkotaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara.
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
- 1) kawasan permukiman perkotaan Muara Sabak Barat di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - 2) kawasan permukiman perkotaan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang;
 - 3) kawasan permukiman perkotaan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara;
 - 4) kawasan permukiman perkotaan Pandan Jaya di Kecamatan Geragai;
 - 5) kawasan permukiman perkotaan Bandar Jaya di Kecamatan Rantau Rasau;
 - 6) kawasan permukiman perkotaan Muara Sabak Timur di Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - 7) kawasan permukiman perkotaan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi;
 - 8) kawasan permukiman perkotaan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu;
 - 9) kawasan permukiman perkotaan Simpang Desa di Kecamatan Berbak.
- b) Pengembangan permukiman perdesaan di seluruh kecamatan yang termasuk dalam wilayah KSP Pantai Timur Jambi.
 - c) Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
 - d) Pembatasan dan penertiban perkembangan permukiman agar tidak mengganggu kawasan lindung.
 - e) Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah.
 - f) Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan.



Gambar 4.12 Peta Rencana Zona Permukiman KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.2.2.3 Zona Industri

Zona industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri. Zona ini merupakan tempat kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Beberapa industri yang diarahkan pada KSP Pantai Timur Jambi ini, meliputi industri pengolahan hasil perikanan, industri kapal tradisional, dan industri berbasis non kelautan.

a. Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Industri pengolahan hasil perikanan adalah industri pengolahan hasil perikanan bersifat tradisional atau skala rumah tangga. Hasil olahan berupa ikan asin dengan jumlah produk pengolahan ini tidak banyak, karena pada umumnya hasil tangkapan nelayan di pasarkan dalam bentuk segar. Industri pengolahan hasil perikanan di KSP Pantai Timur Jambi ini terdapat di Kecamatan Seberang Kota (Kabupaten Tanjung Jabung Barat), Kecamatan Kuala Jambi, Muara Sabak Timur, dan Nipah Panjang (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

b. Industri Kapal Tradisional

Kapal merupakan sarana utama yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perikanan, seperti pengangkutan, penangkapan ikan, dan penelitian. Galangan kapal merupakan tempat untuk membangun dan memperbaiki kapal yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan industri perikanan tangkap di Indonesia. Berdasarkan tingkat teknologinya galangan kapal dibedakan menjadi 3, yaitu modern, semi modern, dan tradisional. Galangan kapal modern lebih diperuntukkan untuk pembangunan kapal baja dan fiber sedangkan galangan kapal tradisional untuk membangun kapal kayu (Kurniati, et.al., 2005).

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka industri kapal yang terdapat di wilayah KSP Pantai Timur Jambi adalah industri kapal tradisional. Industri kapal tradisional ini terdapat di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Industri berbasis Non Kelautan

Industri berbasis non kelautan yang direncanakan di KSP Pantai Timur Jambi, terdiri atas industri besar, menengah, dan industri kecil. Adapun industri besar dan menengah yang diarahkan, yakni:

- 1) Industri pengolahan kelapa (industri menengah) dalam dan turunannya di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Industri pengolahan kopi (industri menengah) di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- 3) Kawasan industri hilir berlokasi di Desa Tungal I, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 4) Kawasan industri dari sudut kepentingan ekonomi, yakni Ujung Jabung di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun bentuk-bentuk industri yang diarahkan untuk dikembangkan pada kawasan ini, meliputi:
 - a. Kelapa Sawit sebagai komoditi andalan di Jambi dan sekitarnya dapat dilakukan pengolahan lanjut CPO berupa kegiatan industri berbasis kelapa sawit yang dapat dilakukan pemilihan jenis industri turunannya secara bertahap sesuai dengan pohon industri kelapa sawit tersebut.
 - b. Karet yang juga merupakan komoditi andalan di Jambi dan sekitarnya dapat dilakukan pengolahan lanjut berupa kegiatan industri berbasis karet yang dapat dilakukan pemilihan jenis industri turunannya secara bertahap sesuai dengan pohon industri karet tersebut.
 - c. Kelapa Dalam sebagai komoditi andalan lainnya di Jambi dan sekitarnya dapat dilakukan pengolahan lanjut berupa kegiatan industri berbasis kelapa dalam yang dapat dilakukan pemilihan jenis industri turunannya secara bertahap sesuai dengan pohon industri kelapa dalam tersebut.
 - d. Minyak dan Gas sebagai komoditi andalan di Jambi dan sekitarnya dapat dilakukan pengolahan lanjut berupa kegiatan industri berbasis minyak dan gas seperti kilang BBM, kilang LNG, BBG, industri petro kimia hilir, dan lainnya.
 - e. Industri kreatif.
- 5) Kawasan industri dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yakni kawasan industri pertambangan minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun industri kecil yang diarahkan, yakni:

- 1) Industri pengolahan makanan di Kecamatan Tungal Ilir, Kecamatan Kuala Betara (Kabupaten Tanjung Jabung Barat), Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Dendang, Berbak, Nipah Panjang, Geragai, dan Rantau Rasau (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).
- 2) Industri pengolahan gula kelapa di Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 3) Industri kerajinan batik, anyaman purun, anyaman rotan, anyaman pandang dan kerajinan batok kelapa (tempurung) di Kecamatan Tungal Ilir, Kecamatan Kuala Betara (Kabupaten

Tanjung Jabung Barat), Kecamatan Muara Sabak Barat, dan Kecamatan Mendahara (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

Berikut adalah alokasi lahan untuk rencana zona industri di KSP Pantai Timur Jambi.

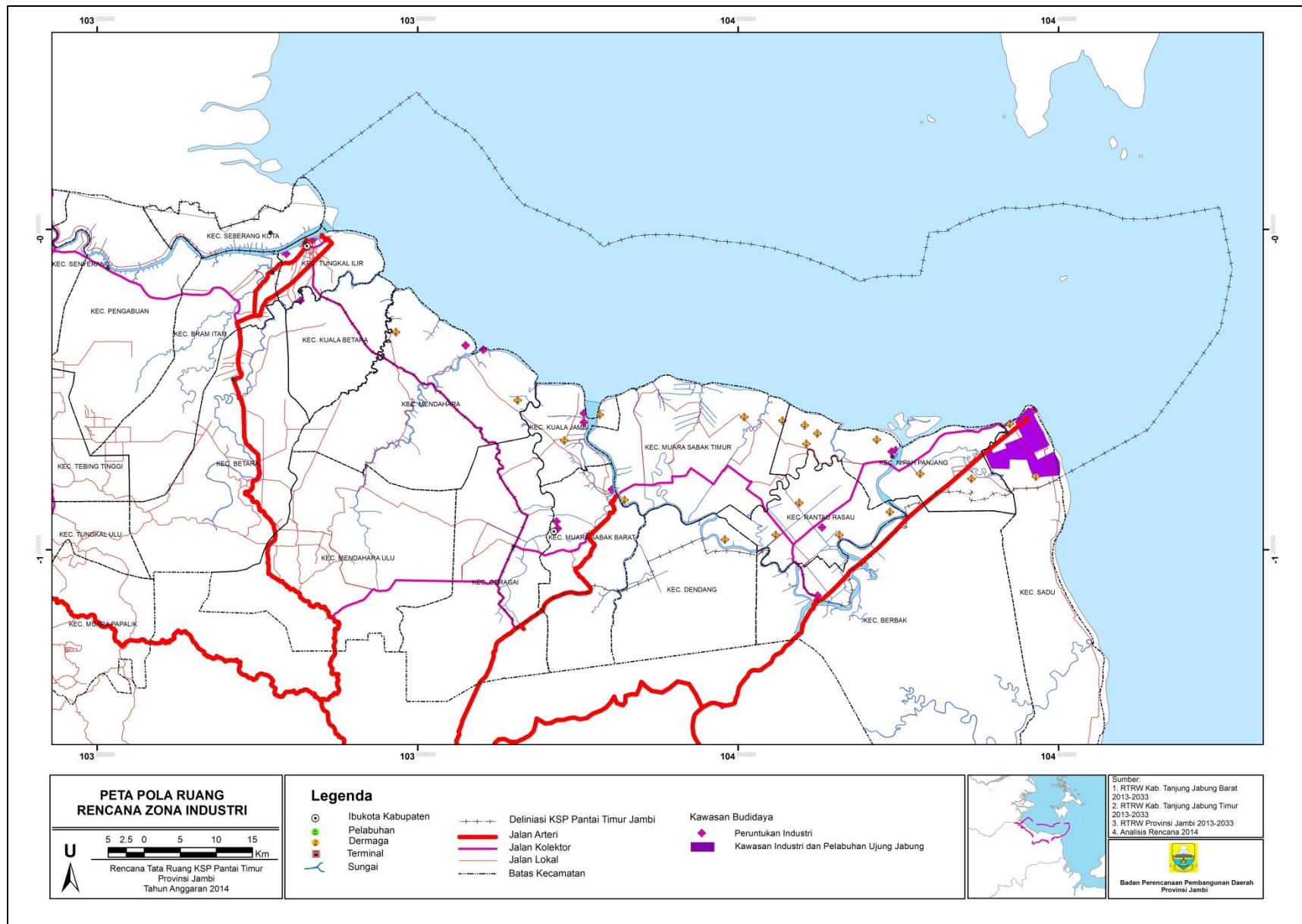
**Tabel 4.13 Rencana Penetapan Zona Industri
di KSP Pantai Timur Jambi**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)*
Kab. Tanjung Jabung Timur		
1	Sadu (Ujung Jabung)	1842.00
<i>*Luas dihitung menggunakan ArcGIS</i>		

Sumber: Rencana, 2014

Adapun perlakuan yang diarahkan dalam perwujudan rencana zona industri di KSP Pantai Timur Jambi adalah:

- Penetapan batas kawasan peruntukan industri.
- Penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing.
- Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri.
- Pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu.
- Pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.



Gambar 4.13 Peta Zona Industri KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

4.2.2.4 Zona Pertambangan

Zona pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pertambangan dalam skala besar yang terdapat di wilayah KSP Pantai Timur Jambi adalah minyak dan gas bumi yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berikut adalah alokasi lahan untuk zona pertambangan di KSP Pantai Timur Jambi.

Tabel 4.14 Rencana Penetapan Zona Pertambangan (Minyak dan Gas Bumi) di KSP Pantai Timur Jambi

No.	Kecamatan	Luas (Ha)*
Kab. Tanjung Jabung Timur		
1	Muara Sabak Timur	4787.49
2	Kuala Jambi	230.78
3	Mendahara	249.52
4	Geragai	1243.57
5	Muara Sabak Barat	7751.79
6	Dendang	1166.08
Total		15429.23
<i>*Luas dihitung menggunakan ArcGIS</i>		

Sumber: Rencana, 2014

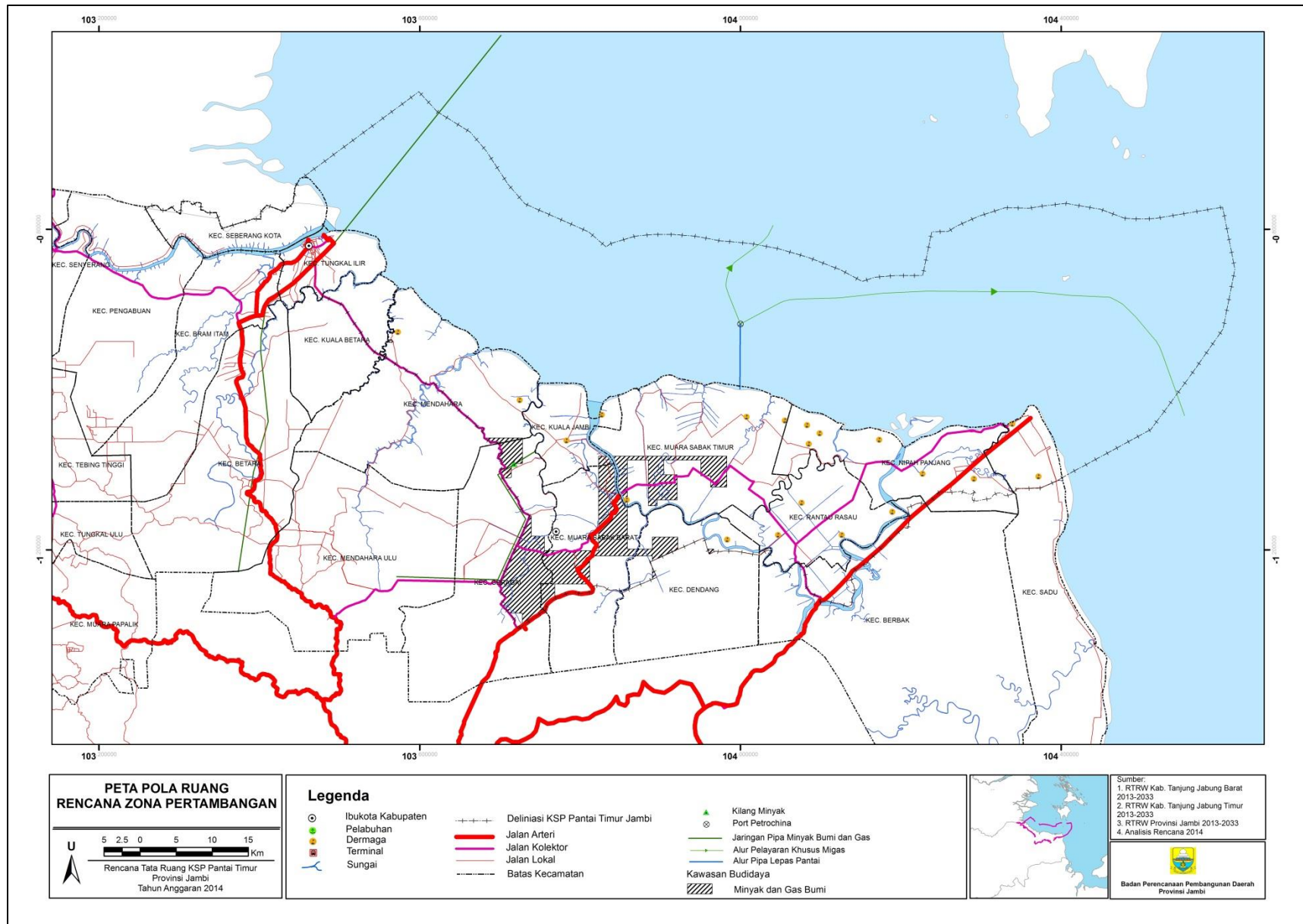
Selain zona pertambangan yang terdapat di wilayah darat, pada wilayah KSP Pantai Timur Jambi ini juga terdapat pelabuhan khusus (port) yang dimiliki Petrochina untuk mengangkut hasil tambangnya. Port tersebut berada pada posisi garis lintang 0°55'5.24"S dan garis bujur 104° 0'0.44"T.

Selain pertambangan minyak dan gas bumi, juga terdapat pertambangan lain yang termasuk dalam wilayah KSP Pantai Timur Jambi namun dalam skala kecil, yakni pertambangan mineral dan pertambangan rakyat. Pertambangan mineral, meliputi: 1) pertambangan batu andesit di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan 2) pertambangan lempung di Kecamatan Rantau Rasau dan Geragai. Pertambangan rakyat berupa pasir sungai, terdapat di Kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang, Dendang, dan Muara Sabak Timur.

Adapun perlakuan yang diarahkan dalam perwujudan zona pertambangan di KSP Pantai Timur Jambi adalah:

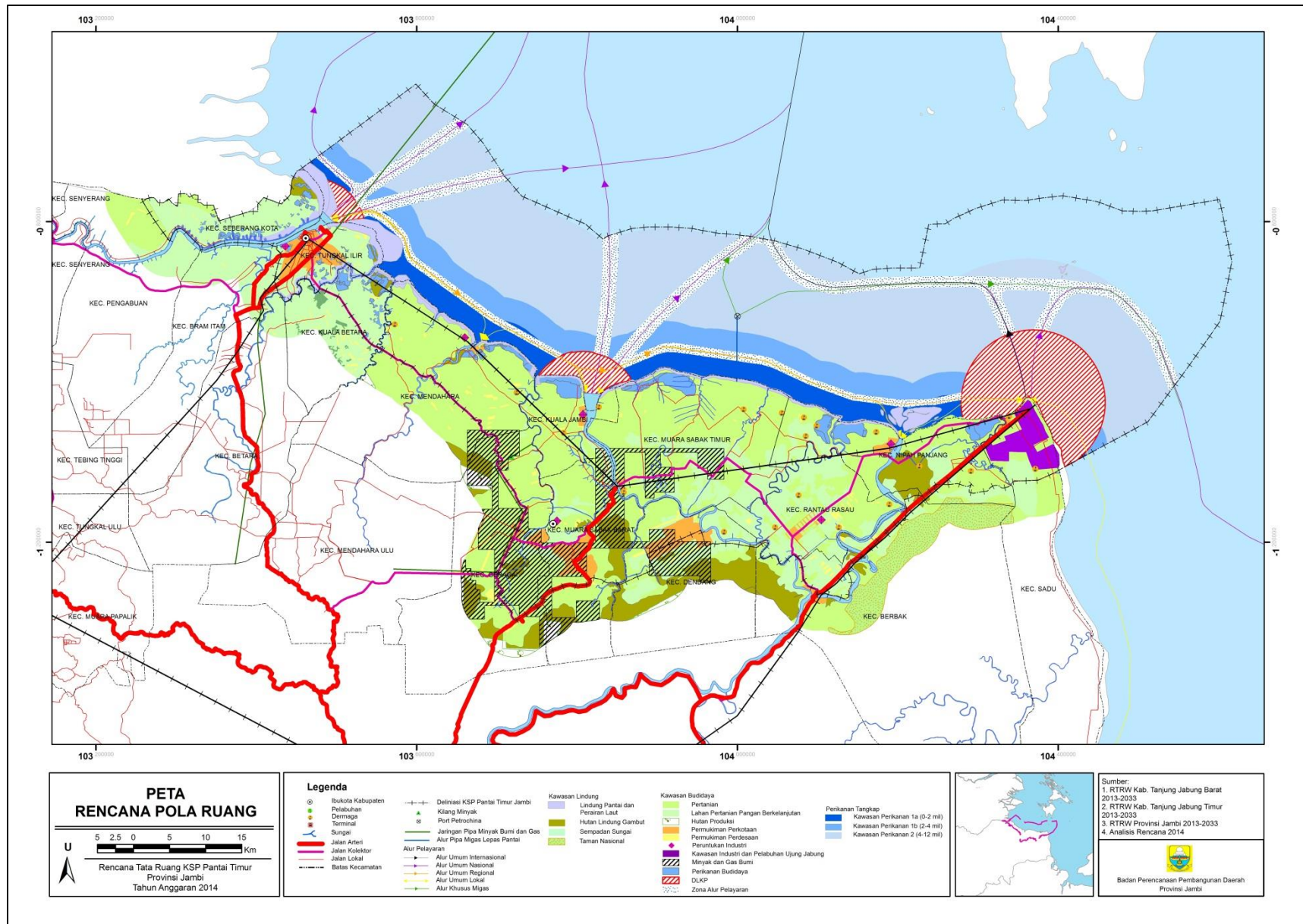
- Penetapan batas zona pertambangan dan potensi pertambangan.
- Penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan.
- Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang.
- Pengendalian dampak pengelolaan tambang secara ketat.

- e) Perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang.
- f) Peningkatan peran serta pelaku pertambangan, baik masyarakat maupun swasta.



Gambar 4.15 Peta Rencana Zona Pertambangan KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014



Gambar 4.15 Peta Rencana Pola Ruang KSP Pantai Timur Jambi

Sumber: Rencana, 2014

